

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(STUDI PADA KECAMATAN DIWEK JOMBANG)**

SKRIPSI



Oleh

ARDINI KHAIRUL UMMAMI

NIM : 19520015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(STUDI PADA KECAMATAN DIWEK JOMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ARDINI KHAIRUL UMMAMI

NIM : 19520015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(STUDI PADA KECAMATAN DIWEK JOMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

ARDINI KHAIRUL UMMAMI

NIM : 19520015

Telah Disetujui Pada Tanggal 24 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA., CAP.

NIP. 197707022006042001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(STUDI PADA KECAMATAN DIWEK JOMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

ARDINI KHAIRUL UMMAMI

NIM : 19520015

Telah Siptertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 27 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

**Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA,
CSRA**

NIP. 19760313201802012188

2 Anggota Penguji

Dr. Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

NIP. 197510302023212004

3 Sekretaris Penguji

Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA., CAP.

NIP. 197707022006042001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA., CAP.

NIP. 197707022006042001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ardini Khairul Ummami
NIM : 19520015
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA KECAMATAN DIWEEK JOMBANG)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 Juni 2024

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink is placed over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text '10000', 'METRASI', and 'TEMPEL'. A serial number '96BAKX850056596' is visible at the bottom of the stamp.

Ardini Khairul Ummami
NIM: 19520015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orang-orang terhebat penulis kedua orang tua Bapak Abdul Ghofur, Ibu Winarsih, dan adik Zahrotul Ulumiyah Askar tercinta yang telah senantiasa mencurahkan do'a, motivasi, dukungan, kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.

Om penulis Alm. Gunanto yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, motivasi, cinta kasih, dan telah menjadi tempat kedua untuk penulis.

Diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah untuk bertahan sampai saat ini.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: Fa inna ma’al usri yusro innama’ul usri yusro.”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Apapun yang sudah terjadi didalam hidupmu, jangan katakana “seandainya” tapi katakana “Qodarullah” karena semua yang terjadi Adalah takdir Allah itu selalu baik, karena Allah itu maha baik.”

-Ustadz Hanan Attaki-

“Untuk apapun yang terjadi, aku hanya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Bahkan ketika orang-orang meremehkanku atau dititik terburukku dalam hidup, aku selalu ingin bermanfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitar”

-Ardini Khairul Ummami-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA KECAMATAN DIWEK JOMBANG)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah yang telah menunjukan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada bimbingan dan sumbang pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Zainuddin. M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Meldona, MM selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar selama perkuliahan sehingga penulis bisa sampai pada titik skripsi ini.

6. Bapak Fadlil Abdani, M.A selaku wali dosen yang telah memberi semangat, motivasi, masukan selama perwalian perkuliahan.
7. Bapak/Ibu narasumber dan pihak-pihak yang senantiasa membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Winarsih selaku orang tua penulis dan adik saya Zahrotul Ulumiyah Askar yang telah senantiasa memberikan do'a, semangat, motivasi, perhatian, kasih sayang, dan dukungan baik secara moril maupun spiritual.
9. Alm. Bapak Gunanto selaku Om penulis yang telah senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, dan do'a sampai nafas terakhir beliau.
10. Teman-teman seperjuangan Tasya, Shinta, Zukhay, Putri, Apin, Ratna, Rizki, yang telah memberikan warna selama perkuliahan, kebahagiaan, motivasi dukungan dan semangat sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dan keikhlasan hati yang telah banyak tercurah kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang dapat membantu untuk kesempurnaan penulisan. Semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Yarabbalalamin.

Malang, 22 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teoritis	20
2.2.1 Teori Stewardship	20
2.2.2 Sistem Pengendalian Internal.....	21
2.2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia.....	24
2.2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	25
2.2.5 Laporan Keuangan Daerah.....	27
2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.2.7 Kajian Perspektif Islam.....	30

2.3 Kerangka Konseptual.....	34
2.4 Hipotesis Penelitian	35
2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	35
2.4.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	36
2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	38
2.4.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z).....	38
2.4.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	39
2.4.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi	40
2.4.7 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi	40
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
3.2 Populasi dan Sampel	42
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	42
3.4 Data Dan Jenis Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.7 Analisis Data	46
3.7.2 Uji Model Pengukuran (Outer Model).....	49
3.7.3 Uji Model Struktural (Inner Model).....	51
3.7.4 Pengujian Mediasi.....	51
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.2 Struktur Organisasi	53
4.1.3 Tugas dan Fungsi Kecamatan Diwek.....	54
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	60
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	60
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	61
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jabatan	61
4.3 Evaluasi Outer Model (Measurement Model)	62
4.3.1 Uji Validitas	62
4.3.2 Uji Reabilitas	64
4.4 Evaluasi Inner Model (Structural Model)	65
4.5 Uji Hipotesis	68
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	73
4.6.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	73
4.6.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	75
4.6.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	76
4.6.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	78
4.6.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	80
4.6.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi	81
4.6.7 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi	83
BAB V	85
PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Skala Likert	44
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian	45
Tabel 4. 1 Daftar Desa Yang Menjadi Responden	59
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	60
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	61
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jabatan.....	61
Tabel 4. 7 Nilai Loading Factor	62
Tabel 4. 8 Nilai Cross Loading.....	63
Tabel 4. 9 Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability	65
Tabel 4. 10 Nilai <i>R Square</i> dan <i>R Square Adjusted</i>	66
Tabel 4. 11 Nilai <i>Q² Predict</i>.....	67
Tabel 4. 12 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung	69
Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Teknik Pengambilan Sampel	43
Gambar 4 1 Model Blindfolding	68
Gambar 4 2 Model Boostraping	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	92
Lampiran 2 Teks Pertanyaan Wawancara.....	97
Lampiran 3 Data Kuesioner.....	98
Lampiran 4 Hasil Uji SmartPLS	103
Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	105
Lampiran 6 Jurnal Bimbingan	106
Lampiran 7 Biodata Peneliti	108

ABSTRAK

Ardini Khairul Ummami. 2024, THESIS. Title: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Kecamatan Diwek Jombang)

Pembimbing : Dr. Hj. Meldona, SE, MM., Ak., CA

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Beberapa tahun ini pengelolaan keuangan desa mengalami beberapa perubahan, dilihat dari segi mekanisme pengelolaannya ataupun dari jumlah dana yang dikelola. Semakin meningkatnya pengelolaan keuangan desa maka risiko dalam pengelolaan keuangan desa juga meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel mediasi studi pada Kecamatan Diwek Jombang.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa di kantor desa Kecamatan Diwek yang berjumlah 229 orang dari 20 kantor desa, menggunakan teknik purposive sampling. Perhitungan sampel menggunakan *sample size calculator* Raosoft.com, sehingga sampel yang diperlukan untuk menyatakan penelitian ini valid sebanyak 40 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan acar menyebarkan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data kuesioner menggunakan Partial Least Square dengan software SmartPLS 4.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi daerah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel mediasi, kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel mediasi.

ABSTRACT

Ardini Khairul Ummami. 2024, THESIS. Title: The Influence of Internal Control Systems and Human Resource Quality on the Quality of Regional Government Financial Reports with the Utilization of Information Technology as a Mediating Variable (Study in Diwek District, Jombang)

Supervisor : Dr. Hj. Meldona, SE, MM., Ak., CA

Keywords : Internal Control System, Quality of Human Resources, Quality of Local Government Financial Statements, Utilization of Information Technology

In recent years, village financial management has undergone several changes, in terms of the management mechanism or the amount of funds managed. The more village financial management increases, the risk in village financial management also increases. This study aims to test and analyze the influence of the internal control system and the quality of human resources on the quality of local government financial statements by using information technology as a mediating variable in the study in Diwek Jombang District.

The research method used in this study is quantitative. The population in this study was all village officials in the Diwek District village office, totaling 229 people from 20 village offices, using a purposive sampling technique. The sample calculation used the sample size calculator Raosoft.com, so the sample required to declare this study valid was 40 samples. Data collection techniques used a series of distributing questionnaires and interviews. The questionnaire data analysis technique used Partial Least Square with SmartPLS 4.0 software.

The results of the study show that the internal control system has a significant effect on the quality of local government financial statements, the quality of human resources has a significant effect on the quality of local government financial statements, the internal control system has a significant effect on the use of regional information technology, the quality of human resources has a significant effect on the use of information technology, and the use of information technology has a significant effect On the quality of local government financial statements, the internal control system has a significant effect on the quality of local government financial statements with the use of information technology as a mediation variable, the quality of human resources has a significant effect on the quality of local government financial statements with the use of information technology as a mediation variable.

الملخص

أرديني خيرول أامي. 2024 ، أطروحة. العنوان: نظام الرقابة الداخلية وجودة الموارد البشرية على جودة البيانات المالية للحكومات المحلية مع استخدام تكنولوجيا المعلومات كمتغير للوساطة (دراسة عن مقاطعة ديويك جومبانج)

المشرف: د. ه. ميلدونا ، CA ، Ak. ، MM. ، SE

الكلمات المفتاحية: نظام الرقابة الداخلية، جودة الموارد البشرية، جودة البيانات المالية للحكومات المحلية استخدام تكنولوجيا المعلومات

في السنوات الأخيرة ، شهدت الإدارة المالية للقرية عدة تغييرات ، من حيث آلية الإدارة أو مقدار الأموال المدارة. وكلما زادت الإدارة المالية للقرية، زادت المخاطر في الإدارة المالية للقرية. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار وتحليل تأثير نظام الرقابة الداخلية وجودة الموارد البشرية على جودة القوائم المالية للحكومات المحلية باستخدام تكنولوجيا المعلومات كمتغير وسيط في الدراسة في منطقة ديويك جومبانج.

المنهج البحثي المستخدم في هذه الدراسة كمي. شمل مجتمع الدراسة جميع مسؤولي القرى في مكتب قرية مقاطعة ديويك، وبلغ عددهم 229 شخصًا من 20 مكتبًا قرويًا، باستخدام أسلوب أخذ العينات الهادف. لذا كانت العينة المطلوبة لإثبات صحة هذه ، Raosoft.com استخدم في حساب العينة حاسبة حجم العينة الدراسة 40 عينة. استخدمت تقنيات جمع البيانات سلسلة من الاستبيانات الموزعة والمقابلات. أما أسلوب SmartPLS 4.0. تحليل بيانات الاستبيانات، فقد استخدم طريقة المربعات الصغرى الجزئية مع برنامج

أظهرت نتائج الدراسة أن نظام الرقابة الداخلية له تأثير معنوي على جودة القوائم المالية للحكومات المحلية، وجودة الموارد البشرية لها تأثير معنوي على جودة القوائم المالية للحكومات المحلية، ونظام الرقابة الداخلية له تأثير معنوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وجودة الموارد البشرية لها تأثير كبير على استخدام تكنولوجيا المعلومات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات له تأثير معنوي وفيما يتعلق بجودة القوائم المالية للحكومات المحلية، فإن نظام الرقابة الداخلية له تأثير كبير على جودة القوائم المالية للحكومات المحلية مع استخدام تكنولوجيا المعلومات كمتغير وساطة، كما أن جودة الموارد البشرية لها تأثير كبير على جودة القوائم المالية للحكومات المحلية مع استخدام تكنولوجيا المعلومات كمتغير وساطة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun ini pengelolaan keuangan desa mengalami beberapa perubahan, dilihat dari segi mekanisme pengelolaannya ataupun dari jumlah dana yang dikelola. Semakin meningkatnya pengelolaan keuangan desa maka risiko dalam pengelolaan keuangan desa juga meningkat. Beberapa risiko yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dokumen – dokumen yang tidak akurat atau tidak lengkap dan kegagalan atau keterlambatan penyusunan laporan hal ini berdampak penyusunan laporan yang tidak tepat waktu atau tidak tepat kualitas (*understandard*) (Rusydi, n.d.). Untuk menjamin kepatuhan dalam akuntabilitas agar tidak terjadinya penyimpangan dengan adanya legalitas formal. Legalitas formal memerlukan adanya perbuatan yang dilakukan atas ditetapkannya sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menerima dana dari pemerintah atau badan publik lainnya dan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Organisasi sektor publik ini berbeda dengan organisasi sektor swasta, yang didanai oleh investor atau pemilik perusahaan dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk menjalankan program dan layanan publik yang didanai oleh pemerintah atau badan publik lainnya. Tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk menyediakan organisasi dengan informasi yang diperlukan untuk manajemen operasi yang benar, efisien dan ekonomis serta distribusi sumber daya yang andal, untuk dapat mengkomunikasikan informasi kepada publik dan memungkinkan manajer untuk mengambil alih tanggung jawab mereka, menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien untuk mengelola program dan penggunaan sumber daya secara efektif sesuai dengan kewenangannya dan untuk memungkinkan pegawai pemerintah melaporkan kegiatan pemerintah dan penggunaan dana publik secara terbuka (Belinda & Costari, 2021).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk akuntabilitas pemerintah yang melibatkan manajemen di instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada publik dalam pengelolaan laporan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang signifikan, tepat dan berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, penilaian kinerja pemerintah dan sebagai alat pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas (Fathia et al., 2020).

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting untuk mencapai akuntabilitas keuangan sektor publik. Perkembangan catatan pelaporan keuangan dan penerapannya pada organisasi sektor publik, dalam hal ini pemerintah telah menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Pelaporan keuangan akan membantu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan serta memenuhi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Informasi yang dibutuhkan oleh institusi publik atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran (Hendri et al, 2020).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018), Pendekatan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab diperlukan di desa. Diyakini bahwa kewenangan yang terdesentralisasi ini akan memberi masyarakat lebih banyak kendali atas anggaran dan masalah keuangan mereka sendiri. Perencanaan, anggaran, administrasi, pelaporan, tanggung jawab, dan pengawasan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, menurut ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Pengelolaan keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli desa juga harus dikelola dengan baik dan jujur demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan dan pembangunan Kabupaten atau Kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu sistem pengendalian internal (Ramadhani et al., 2019). Karena sistem pengendalian internal dapat digunakan sebagai interaksi yang diperlukan dalam kegiatan dan latihan yang diselesaikan oleh inisiatif dan semua pekerja untuk memberikan kepercayaan yang memuaskan dalam pembuatan tujuan hierarkis melalui latihan yang kuat dan produktif, kualitas laporan moneter yang tak tergoyahkan, melindungi sumber daya dan konsistensi negara dengan peraturan dan pedoman (Adhivinna & Damayanti, 2020). Penerapan pengendalian internal yang benar dan baik pada suatu pemerintahan akan dapat mencegah terjadinya penggelapan dan risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan (I Gusti & Putu Eka, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Goo, 2022), (Puspita et al., 2021) menghasilkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sistem pengendalian internal yang lebih baik menunjukkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Faktor kunci dalam membangun keandalan pelaporan keuangan adalah keberadaan sistem pengendalian internal. Namun, jika dibandingkan dengan komponen penelitian, hal ini berdampak negatif (Philadelphphia et al., 2020). Hal ini terjadi karena pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah belum didukung pengendalian internal yang memadai, kebijakan akuntansi yang ditetapkan belum dilaksanakan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat penting untuk organisasi, perencana atau pelaku aktif dan juga merupakan aset organisasi baik sektor swasta maupun pemerintah (Agustiawan et al., 2021a). Guna mewujudkan pelaporan yang akuntabel diharapkan sumber daya manusia memiliki kontribusi pada pembuatan kualitas laporan keuangan dan berkompeten. Sumber daya manusia pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan publik, mengelola keuangan, membangun infrastruktur dan melindungi masyarakat.

Sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki latar pendidikan akuntansi ataupun memiliki kemampuan dalam bidang keuangan sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat menerapkan sistem akuntansi dengan baik (Khoirunnisa & Khoiriawati, 2022). Untuk dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya seperti rekrutmen yang selektif, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pembinaan karir, dan penghargaan dan motivasi yang layak. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pegawai yang memiliki integritas, profesionalisme serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki kualitas tersebut bisa menimbulkan kendala dalam pelaksanaan fungsi akuntansi kemudian informasi yang diperoleh pada akhirnya dapat berubah menjadi informasi yang buruk.

Pada penelitian (D. Puspita et al., 2021), (Agustiawan et al., 2021), (Tanjung & Wina Sonia, 2021) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia menghasilkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan dapat juga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus, dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepadanya. Namun, bertentangan dengan dari hasil analisis variabel

pada penelitian (Philadhelphia et al., 2020) tidak berpengaruh. Hasil analisis frekuensi jawaban responden pada variabel ini paling rendah pada pernyataan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang artinya pegawai belum mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai Peraturan Pemerintah tersebut. Dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai bahwa kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi dan kurangnya pegawai yang mengikuti diklat atau pelatihan di bidang ekonomi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi (Fathia et al., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Keberhasilan teknologi informasi diharapkan mampu menghasilkan informasi nilai asset yang sebenarnya dan mampu meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan, sehingga pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan secara maksimal dapat berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Fazlurahman et al., 2021). Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah, memperoleh data yang lebih akurat, dan menghindari penyalahgunaan informasi keuangan. (Mariana Tampubolon & Basid, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan terhadap pelaporan keuangan (Khoirunnisa & Khoiriawati, 2022). Penerapan teknologi yang kurang optimal berdampak pada kualitas pelaporan keuangan, sehingga mengakibatkan pelaporan keuangan tepat waktu, kurangnya akuntabilitas, dan kesulitan dalam melakukan pengelolaan keuangan berbasis sumber daya. Oleh karena itu pemerintah daerah diharuskan untuk beralih pada sistem computer dan meninggalkan sistem manual dalam melaksanakan pekerjaannya.

Teknologi informasi memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan informasi, dan bukan hanya memiliki fungsi sebagai teknologi komputer yang dapat memproses serta menyimpan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi informasi pembuat laporan keuangan dapat terbantu untuk menyiapkan laporan keuangan yang tepat serta dokumen untuk menyusun laporan keuangan dapat terkumpul dengan cepat.

Pada penelitian (Hadis, 2022), (Saputra, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika pemanfaatan teknologi informasi dimaksimalkan dalam suatu instansi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan karena sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam proses menghasilkan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang ditempuh dengan cara penggunaan software aplikasi untuk melaksanakan tugas pembuatan laporan keuangan, dimana software tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dukungan jaringan internet dalam proses penggunaan software tersebut untuk memaksimalkan pemanfaatan software, selain itu jaringan internet juga digunakan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi, selain itu implementasi sistem informasi akuntansi untuk memudahkan proses komunikasi antar divisi atau bagian dalam organisasi (Saputra, 2021).

Lokasi pada penelitian ini adalah Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Lokasi tersebut dipilih karena Kecamatan Diwek memiliki desa terbanyak kedua setelah Kecamatan Jombang dengan jumlah 20 desa. Selain itu perangkat desa di Kecamatan Diwek masih banyak yang berpendidikan rendah termasuk bagian keuangan yang masih ada lulusan SMA atau bukan lulusan Sarjana Akuntansi. Hal ini mengakibatkan kualitas laporan keuangan akan tidak sesuai karena kemampuan yang dimiliki tidak memadai dibidangnya.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa beberapa tahun ini pengelolaan keuangan desa mengalami beberapa perubahan, dilihat dari segi

mekanisme pengelolaannya ataupun dari jumlah dana yang dikelola. Semakin meningkatnya pengelolaan keuangan desa maka risiko dalam pengelolaan keuangan desa juga meningkat. Beberapa risiko yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dokumen – dokumen yang tidak akurat atau tidak lengkap dan kegagalan atau keterlambatan penyusunan laporan hal ini berdampak penyusunan laporan yang tidak tepat waktu atau tidak tepat kualitas (*understandard*)

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian pertama kali karena belum ada yang meneliti pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel mediasi. Maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Mediasi” (Studi Pada Kecamatan Diwék Jombang).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, kami dapat menyimpulkan tujuan penelitian berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah serta dapat menjadi referensi tambahan baik segi pengetahuan maupun bahan kajian pembaca terkait laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2) Bagi Penulis

Dapat memberikan manfaat, pengalaman, latihan dan pengembangan teori yang diterapkan yang didapat selama di bangku perkuliahan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang jelas dan terarah, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut, sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah kepala desa serta kepala urusan keuangan atau bendahara yang ada di kantor desa Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang masa jabatan 2019-2027

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian maka diperlukannya penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai rujukan penelitian juga penunjang pada penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai penunjangnya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dimas Rusvianto, Sri Mulyani, & Indri Yuliafitri, (2018)	Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung).	Kuantitatif	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.
2	Ni Nyoman Trisnawati, Dewa Nyoman Wiratmaja,	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem	Kuantitatif	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(2018)	Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.		Intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3	Triyanti, Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang).	Kausal Komparatif	Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4	Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari, (2019)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern,	Kuantitatif	Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfatan Teknologi

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten).		Informasi dan pemahaman atas sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, Astrid Maharani (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Regresi Linier Berganda	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi. Pemanfaatan Teknologi

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Informasi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi.
6	Nurul Fathia, Amries Rusli Tanjung, Novita Indarawati, (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi	Regresi linier berganda	Sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen organisasi hanya berhasil memoderasi hubungan antara Sistem

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Sebagai Variabel <i>Moderating</i> (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir”.		Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
7	Hengky Orlanda, Muhammad Gowon, Muhammad Erwati, (2020)	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuantitatif	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Sumber Daya Manusia baik secara simultan maupun

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi)		parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
8	Diana Puspita, Fadli, Halimatusyadiah, (2020)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma.	Kuantitatif	Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
9	Abdul Hafidz Tanjung, Wina	Pengaruh Sistem Pengendalian	Deskriptif dan	Sistem pengendalian

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Sonia, (2021)	Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi.	Asosiatif	internal dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Kota Cimahi.
10	Agustiawan, Annie Mustika Putri, Yoni Saputra, (2021)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Kuantitatif	Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Audit Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
11	Novi Chandra Saputra, (2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem	Kuantitatif	Pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah,

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern. Namun pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap sistem pengendalian intern.

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
12	Emilianus Eo Kutu Goo, (2022)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka	Kuantitatif	Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan pada Kabupaten Sikka.
13	Faramitha Riskia, Fitrini Mansur, Misni Erwati, (2022)	Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi melalui Pemanfaatan Teknologi	Survei <i>eksplanatory</i> atau verifikatif	Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh langsung terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia memiliki

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Informasi sebagai Variabel Intervening		pengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sumber : Diolah peneliti (2024)

Berdasarkan paparan hasil penelitian sebelumnya diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel penelitian dimana penelitian ini menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan diuji pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi digunakan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini. Pemanfaatan Teknologi Informasi digunakan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini karena untuk mengetahui optimalisasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah, memproses transaksi dengan cepat, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan konsisten daripada menggunakan proses manual. Selain itu juga penggunaan sampel dan periode pengamatan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sampel kantor desa Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

2.2 Kajian Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian teori ialah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Stewardship

Teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan pada tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), dan mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi pencapaian sebuah tujuan. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson & Davis, 1991).

Asumsi penting dari *stewardship* adalah pengelola menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan pemilik dan berperilaku sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama. Teori *stewardship* berasumsi bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitas menjadi maksimal. Ketika terjadi konflik antara kepentingan kedua belah pihak, *steward* berupaya untuk bekerja sama daripada berkonflik karena mereka fokus pada tujuan organisasi daripada tujuan pribadi

Praktik dalam organisasi sektor publik adalah konsep yang didasarkan pada teori *stewardship*. Pemerintah daerah yang bersifat administrator melayani masyarakat sebagai pemilik (*principal*). Sebab, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis, dan dalam konteks nasional, rakyat dan masyarakatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. “Dari rakyat, untuk rakyat.” Teori *stewardship* cocok digunakan pada organisasi sektor publik karena pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama struktur pemerintahan atau negara yang baik.

Posisi pemerintah daerah sebagai lembaga terpercaya dan wadah aspirasi bersifat publik, melayani masyarakat dan bertanggung jawab untuk pengelolaan dana masyarakat dan oleh karena itu pengelolaan pemerintah daerah harus transparan. Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini memungkinkan pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat menjalankan fungsi dan perannya secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk dari rasa pertanggungjawaban keuangan untuk mencapai tujuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat itu. Untuk mencapai misinya, *steward* menggunakan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan informasi pelaporan keuangan berkualitas tinggi.

2.2.2 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Raharjo, 2013).

Pengendalian internal digunakan dalam mengatur aktivitas didalam sebuah organisasi / perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Mulyadi, 2016) tujuan dari pengendalian internal adalah menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut (Bastian, 2010), Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal sebagai salah satu bentuk *monitoring cost* bagi *principal* untuk mencapai tujuan sesuai dengan kepentingan organisasi/perusahaan. *Monitoring cost* ini bertujuan untuk memastikan *output* laporan keuangan organisasi/perusahaan yang berkualitas.

Peraturan pemerintah dijadikan sebagai pedoman untuk merancang sistem pengendalian internal pada pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Menurut (Dimas et al., 2018) indikator dalam variabel ini adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan organisasi pemerintah diwajibkan memelihara serta menciptakan lingkungan pengendalian yang membuat perilaku kondusif dan positif untuk menerapkan sistem pengendalian intern didalam lingkungan kerjanya melalui komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, penegakan integritas serta nilai etika, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, penyerahan wewenang serta tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan organisasi terkait.

b. Penilaian Risiko

Pimpinan organisasi pemerintah diwajibkan melakukan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko serta analisis risiko. Pemerintah secara efektif dan efisien mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat tujuan yang ingin dicapai.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan organisasi pemerintah harus menerapkan aktivitas pengendalian yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas, sifat dari tugas serta fungsi instansi pemerintah yang terkait. Implementasi yang dimaksud bahwa kegiatan pengendalian yang diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan

pengendalian dipilih sesuai dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur ditetapkan tertulis, prosedur yang ditetapkan dilaksanakan harus sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis, dan kegiatan pengendalian dievaluasi teratur untuk memastikan kegiatan masih sesuai seperti dengan yang diharapkan.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan organisasi pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi informasi yang dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan segala bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui system informasi secara terus-menerus.

e. Pemantauan

Pimpinan organisasi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur yang saling terkait satu dengan yang lain dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material. Sistem pengendalian internal dirancang untuk dapat menganalisa sistem pengendalian internal telah memadai atau belum serta mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut dapat berupa kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian anggaran pendapatan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian internal.

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2016) ada empat unsur dari sistem pengendalian internal, yaitu:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hullah et al., 2012). Sumber daya manusia memerankan peran penting dalam skala kecil maupun besar. Pada setiap organisasi, besar maupun kecil, kunci keberhasilan utama bagi organisasi tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mengendalikan dan menjalankannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, maka dapat mengalami kendala dalam melakukan pekerjaannya.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 10 mendefinisikan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasilhasil (*outcomes*) (Winindyaningrum & Rahmawati, 2010).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya bekal pendidikan pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001) dalam (Arfianti, 2011). Kualitas sumber daya manusia memiliki tolak ukur yang dijadikan perbandingan atau patokan agar dapat mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya tolak ukur dan batasan ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Menentukan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan

kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak) saja akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau pengalaman yang dikuasainya atau kematangannya. Sumber daya manusia yang di maksud adalah seorang karyawan atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu pemerintah apabila sumber daya manusia berkompeten dan berkualitas, maka dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta bisa menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu juga baik. Menurut indikator dalam variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengakuan di bidang kognitif. Karyawan harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi konten pembelajaran juga cara menerapkannya dengan tepat sesuai kebutuhan perusahaan yang ada.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang agar bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.

3. Sikap (*Attitude*)

Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu yang datang dari luar.

2.2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Istilah "teknologi informasi" didefinisikan secara luas oleh (Mulyadi, 2016) yang mencakup berbagai teknologi, termasuk komputer, peralatan elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Teknologi informasi merupakan teknologi berupa komputer dan komunikasi yang digunakan untuk mengolah informasi (Nengsy, 2018). Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah, memperoleh, mengirimkan, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas (Pangestu, 2019).

Selain sebagai teknologi komputer, teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk pembuatan laporan keuangan tersebut.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik (Apriansyah et al., 2020).

Menurut (Kaukab & Lufthiadi, 2021) pemanfaatan teknologi informasi adalah tentang pengolahan data, pengolahan informasi, proses kerja, serta pengolahan manajemen secara elektronik untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja agar pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik. Selain berperan sebagai media elektronik, teknologi informasi memiliki fungsi untuk penyebaran informasi. Hal ini dapat membantu para pengguna dalam penyusunan laporan keuangan serta mengumpulkan dokumen yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan.

Menurut (Wulan et al., 2020) teknologi informasi adalah pemanfaatan computer elektronik untuk mengubah, menyimpan, melindungi, serta mendapatkan informasi secara aman. Ketika teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, sistem informasi akan mengumpulkan, memproses serta menyimpan data yang dapat dilakukan secara otomatis sehingga keakuratan dapat terjaga (Mutiana et al., 2017).

Menurut (Mardiasmo, 2018) pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integritas informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator:

- 1) Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan.
- 2) Pengelolaan data keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
- 3) Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

2.2.5 Laporan Keuangan Daerah

a. Definisi Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah adalah informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pemaparan dari hasil aktivitas tertentu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja. Daerah (APBD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat 4 opini yang diberikan yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW).

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2018, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Informasi keuangan tersebut digunakan untuk melakukan perancangan

keuangan, menghitung biaya, program, dan penganggaran tahun berikutnya. Pemerintah menggunakan prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah.

b. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tujuan laporan keuangan adalah digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan dari laporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan Keputusan ekonomi, politik, sosial, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) serta pengelolaan (*stewardship*) dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Mardiasmo, 2018).

2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Menurut sudut pandang ini, kualitas laporan keuangan ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang akurat dan jujur yang disampaikan. Artinya, kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan apabila informasi yang disajikan mampu memengaruhi keputusan para pengguna. Hal ini tercermin dari kemampuannya membantu dalam menilai peristiwa masa lalu maupun kondisi saat ini, memprediksi keadaan di masa mendatang, serta menegaskan atau memperbaiki hasil penilaian sebelumnya. Dengan demikian, relevansi informasi dalam laporan keuangan berkaitan langsung dengan tujuan penggunaannya. Adapun ciri-ciri informasi yang relevan adalah sebagai berikut:

- 1) *Feedback Value* (memiliki manfaat umpan balik). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) *Predictive Value* (memiliki manfaat prediktif). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Andal

Suatu informasi laporan keuangan dikatakan andal apabila penyajiannya bebas dari makna yang menyesatkan maupun kesalahan material, menggambarkan fakta secara jujur, dapat diverifikasi, serta disajikan secara netral. Informasi memang bisa relevan, tetapi apabila sifat atau penyajiannya tidak dapat dipercaya, maka pemanfaatannya berpotensi memberikan gambaran yang keliru. Adapun informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Penyajian Jujur

Informasi digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal, yaitu ketika suatu entitas konsisten menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, maupun secara eksternal, yakni ketika entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sejenis. Jika pemerintah memutuskan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada yang berlaku sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan sebaiknya disajikan dalam bentuk dan istilah yang mudah dipahami oleh para pengguna, dengan menyesuaikan pada tingkat pengetahuan mereka. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pemahaman yang cukup mengenai aktivitas serta lingkungan operasional entitas pelaporan, dan juga memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang tersedia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang menyajikan informasi secara jujur, benar, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan harus disiapkan dengan baik dan terlebih dahulu melalui proses audit agar dapat diandalkan.

2.2.7 Kajian Perspektif Islam

a. Perspektif Islam Terkait Sistem Pengendalian Internal

Perspektif keislaman yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa ayat 58)

Dalam islam sistem pengendalian internal sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya menerapkan pengawasan yang melakukan investigasi dan pengawasan kinerja pegawainya (Rahmany & Fatimah, 2020). Pengendalian internal harus dimonitor dan dievaluasi agar manfaat dari pengendalian internal tersebut berdaya dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan (Launuru, 2014). Dengan adanya pengendalian internal yang baik, tujuan dari organisasi

atau perusahaan dimana dilaksanakan melalui kegiatan operasionalnya, tentunya juga akan tercapai.

Perspektif keislaman yang dijelaskan dalam Hadist Riwayat Tirmidzi, yang berbunyi :

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya :

“Barang siapa yang kami angkat untuk suatu tugas, lalu kami beri ia gaji (penghasilan), maka apa yang ia ambil setelah itu (tanpa hak) adalah ghulul (pengkhianatan).” (HR. Tirmidzi No. 1335)

Dalam HR Tirmidzi No. 1335 menegaskan bahwa pengelola harta publik yang menyalahgunakan wewenang atau menyembunyikan informasi keuangan, telah melakukan pengkhianatan (ghulul). Dalam sistem pengendalian internal fungsi pengawasan dan transparansi penting untuk mencegah kecurangan seperti ini. Hadist ini menjadi dasar bahwa pengawasan internal (audit, pengendalian dokumen, pelaporan) adalah bagian dari upaya mencegah praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

b. Perspektif Islam Terkait Kualitas Sumber Daya Manusia

Perspektif keislaman yang dijelaskan pada QS At-Taubah ayat 105, yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya :

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:105)

Ayat tersebut memerintahkan umat manusia untuk bekerja. Bagi islam bekerja adalah sebuah kewajiban setiap muslim yang mampu berkerja, senantiasa menyembah Allah SWT yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan adanya sumber daya manusia yang

berkualitas disertai dengan kualitas iman yang dicerminkan oleh akhlaknya membuat sebuah organisasi atau perusahaan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Hal ini dimaksud untuk menghindari manusia dari sifat malas, pasrah dan tidak beraktivitas. Bekerja dalam islam merupakan kewajiban, bernilai ibadah, mendapatkan pahala, dan dinilai *fi sabilillah* atau berada di jalan Allah SWT.

Perspektif keislaman yang dijelaskan pada HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni, yang berbunyi :

"خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

Artinya :

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."
(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni – hadis hasan)

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa nilai kemuliaan seseorang diukur dari sejauh mana memberikan manfaat kepada orang lain. Pengembangan sumber daya manusia memiliki beberapa makna penting yaitu kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kontributif, memiliki orientasi kerja bukan hanya materi tapi juga nilai sosial, memiliki dorongan untuk terus mengembangkan diri, dan menumbuhkan jiwa kolaboratif dan kepedulian. Kualitas sumber daya manusia dalam pandangan Islam bukan hanya dilihat dari kemampuan teknis, tetapi dari sejauh mana seseorang mampu memberikan manfaat nyata kepada lingkungan dan masyarakat.

c. Perspektif Islam Terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perspektif keislaman yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya..." (QS Al-Baqarah ayat 282)

Kualitas laporan keuangan adalah nilai laporan keuangan yang memenuhi persyaratan, sebuah langkah atau proses yang dilakukan untuk mengarahkan instansi agar dapat menghindarkan instansi dari adanya kekeliruan atau tindakan kecurangan. Dalam QS Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar penting dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, karena Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi dicatat secara terbuka dan adil. Dengan laporan keuangan yang transparan masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran, menilai efektifitas program pemerintah, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Perspektif keislaman yang dijelaskan dari Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam HR Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang kepemimpinan dan tanggung jawab memberikan dasar moral dan spiritual bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Di dalam islam, setiap pengelola keuangan publik adalah pemimpin atas amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, laporan keuangan wajib disusun dengan jujur, akurat, tepat waktu, dan transparan sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dan pertanggungjawaban kepada publik dan Allah SWT.

d. Perspektif Islam Terkait Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perspektif keislaman yang dijelaskan pada QS Ar-Rahman ayat 33, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Artinya :

"Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah; kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (sultan)."(QS. Ar-Rahman: 33)

Dalam QS Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan bahwa sebagai (manusia) harus mempunyai tantangan dan dorongan eksploratif dengan menembus batas-batas semesta hanya mungkin dengan kekuatan yang besar yaitu ilmu dan teknologi. Dengan سُلْطٰنٍ sebagai simbol kekuatan ilmu dan teknologi, ayat ini menjadi dasar etis dan motivasional bagi pemanfaatan teknologi informasi secara positif dan bertanggung jawab dalam kehidupan modern, baik dalam pendidikan, pemerintahan, dakwah, maupun pelayanan publik.

Perspektif keislaman yang dijelaskan HR Muslim, yang berbunyi :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya :

"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

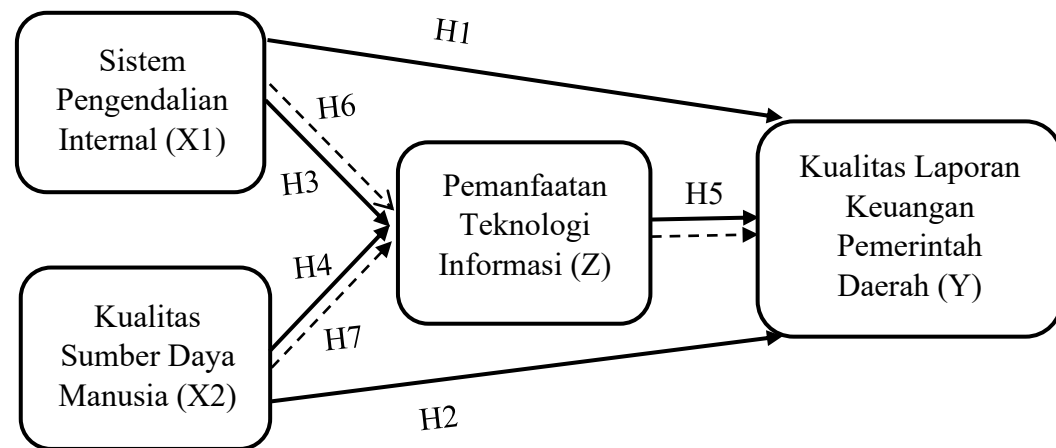
Dalam HR Muslim telah menegaskan bahwa menuntut ilmu Adalah ibadah yang membuka jalan menuju surga. Hadist ini telah menginspirasi umat islam untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama untuk belajar, mengajar, dan menyebarkan ilmu baik agama maupun umum. Dengan menggunakan teknologi secara positif, umat islam tidak hanya mempercepat kemajuan tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ilmu yang bermanfaat.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran konsep yang menggambarkan hubungan antara variabel yang terkait. Hubungan antar variabel dependen dan independen yang terkandung dalam judul penelitian. Kerangka konseptual ini dinilai sangat penting dalam sebuah penelitian. Dimana masalah yang penting dalam penelitian ini yaitu terkait pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) dan

Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi (Z).

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Keterangan :

—————> : Pengaruh Langsung

- - - - -> : Pengaruh Tidak Langsung

Sumber : Peneliti, 2024

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sistem pengendalian internal telah dirancang untuk menganalisa sistem pengendalian internal yang sudah layak dan dapat menemukan adanya kelemahan. Dalam meningkatnya laporan keuangan yang baik diperlukan proses perencanaan, pencatatan laporan keuangan yang akurat dan terkontrol agar menjadi sumber informasi independent.

Penelitian oleh (Dimas et al., 2018) dan (Tanjung & Wina Sonia, 2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat komponen sistem pengendalian internal sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdiri atas lima komponen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

Berbeda dengan penelitian Istiqomah (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal yaitu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah belum didukung pengendalian yang memadai diantaranya kebijakan akuntansi yang ditetapkan belum dijalankan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan belum terintegrasi, pencatatan dan penyajian informasi serta penjelasan selisih atas analisa hubungan antar akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah yang belum optimal sehingga berpotensi mengganggu kewajaran laporan keuangan. Hal ini berarti terdapat gap research antara pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja setiap pegawai dalam perusahaan maupun sebuah instansi. Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus, dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepadanya. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Kemampuan keseluruhan esensinya dibangun oleh dua set faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Robbins & Judge, 2017).

Menurut hasil penelitian dari Puspita et al, (2020) menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini

menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan dapat juga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja setiap pegawai dalam perusahaan maupun sebuah instansi. Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus, dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepadanya.

Menurut hasil penelitian dari penelitian Tanjung et al, (2021) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi. Artinya bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Penelitian Agustiawan et al, (2021) menunjukkan bahwa Sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kantor BPKAD Provinsi Riau , hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia yang kompeten akan menghasilkan kualitas laporan keuangan berkualitas.

Berbeda dengan penelitian Istiqomah (2020) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang artinya sebagian pegawai belum mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai Peraturan Pemerintah tersebut. kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan kurangnya pegawai yang pernah mengikuti diklat/ pelatihan di bidang ekonomi, sehingga kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂ : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan mengganti pengendalian yang biasanya dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. (Elder et al, 2013). Selain itu teknologi informasi menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, teknologi informasi juga dapat mempengaruhi risiko pengendalian secara keseluruhan. Adanya risiko-risiko baru yang bermunculan berkaitan dengan sistem teknologi informasi yang rusak dan gagal.

H₃ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.4.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

Pengembangan teknologi merupakan bagian penting dalam mendorong proses inovasi karena di dalamnya tercakup akumulasi pengetahuan yang terus berkembang. Pada hakikatnya, setiap aktivitas teknologi memiliki unsur teknis yang mampu menghasilkan kemajuan yang lebih signifikan dari waktu ke waktu. Dalam konteks organisasi yang berada di lingkungan yang dinamis, peran teknologi informasi menjadi semakin penting karena memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan efisiensi serta efektivitas sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya membantu mempercepat pekerjaan, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui perolehan pengetahuan dan keterampilan baru.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia lebih berkembang (memperoleh pengetahuan). Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau keahlian yang memadai di bidang teknologi informasi dapat mengelola informasi secara efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang baik juga harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna memudahkan proses transaksi dan memudahkan penyajian laporan keuangan (Shofa et al., 2022). Namun, apabila sumber daya manusia tidak memanfaatkan teknologi informasi maka berpotensi sebuah data yang dihasilkan menjadi tidak akurat karena disebabkan faktor kelalaian manusia (Rizcha & Yaakub, 2023).

H₄ : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.4.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam suatu instansi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan teknologi informasi memberikan kemudahan, kecepatan, serta ketepatan dalam proses pengolahan data keuangan, sehingga mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan yang biasanya muncul apabila dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem komputerisasi, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat.

Peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai melalui penggunaan software aplikasi khusus yang dirancang untuk mendukung tugas-tugas akuntansi. Software ini tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah agar hasil laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Selain software, keberadaan jaringan internet juga menjadi faktor pendukung utama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Internet berfungsi sebagai sarana untuk memaksimalkan penggunaan software aplikasi akuntansi, sekaligus sebagai penghubung antarunit kerja dalam proses pengiriman data dan informasi keuangan. Dengan adanya konektivitas ini, koordinasi antarbagian dalam organisasi dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan transparan (Saputra, 2021).

Penelitian Hadis (2022), Saputra (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₅ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah

2.4.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi

Sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, dikarenakan dapat mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai. Ketika kegiatan penyusunan pelaporan keuangan efisien maka akan tercipta kualitas pelaporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan lancar ketika mengembangkan teknologi informasi. Mengembangkan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal akan membuat kegiatan penyusunan laporan keuangan menjadi cepat dan dapat diperiksa sehingga perbaikan segera dilakukan. Maka dengan penjelasan tersebut sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi.

H₆ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi

2.4.7 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi

Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Puspita et al., 2021). Ketika pemerintahan memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam penyusunan laporan keuangan maka laporan keuangan dapat disusun dengan baik dan berkualitas. Sebaliknya ketika

sumber daya tidak memiliki keahlian dalam menyusun laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan menjadi tidak baik dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia di dukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban yang telah dilakukan selama periode berjalan. Maka dapat dikatakan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskia et al., (2022) yang mana menyatakan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi mampu memediasi kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

H₇ : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan positivistik (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019). Filsafat positivistik digunakan pada populasi dan sampel tertentu.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa di kantor desa Kecamatan Diwek yang berjumlah 229 orang dari 20 kantor desa.

Menurut Sugiyono (2019), sampel yang digunakan sudah mewakili populasi secara akurat dari segi jumlah dan komposisi. Dalam penelitian ini, peneliti di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang melakukan survei kepada empat puluh kepala desa dan bendahara atau kepala bagian keuangan dari masing-masing empat puluh desa yang menjadi sampel penelitian.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk pemilihan sampelnya. Pengumpulan data dengan purposive sampling dilakukan berdasarkan sumber data yang telah dipilih sendiri oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Populasi yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 229 orang. Untuk mendukung penelitian ini, kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa dan kepala urusan keuangan atau bendahara desa
- b. Sekretaris desa
- c. Masa kerja minimal 1 tahun

Gambar 3. 1 Teknik Pengambilan Sampel

Raosoft Sample size calculator

What margin of error can you accept? %
5% is a common choice

What confidence level do you need? %
Typical choices are 90%, 95%, or 99%

What is the population size?
If you don't know, use 20000

What is the response distribution? %
Leave this at 50%

Your recommended sample size is **40**

The margin of error is the amount of error that you can tolerate. If 90% of respondents answer yes, while 10% answer no, you may be able to tolerate a larger amount of error than if the respondents are split 50-50 or 45-55. Lower margin of error requires a larger sample size.

The confidence level is the amount of uncertainty you can tolerate. Suppose that you have 20 yes-no questions in your survey. With a confidence level of 95%, you would expect that for one of the questions (1 in 20), the percentage of people who answer yes would be more than the margin of error away from the true answer. The true answer is the percentage you would get if you exhaustively interviewed everyone. Higher confidence level requires a larger sample size.

How many people are there to choose your random sample from? The sample size doesn't change much for populations larger than 20,000.

For each question, what do you expect the results will be? If the sample is skewed highly one way or the other, the population probably is, too. If you don't know, use 50%, which gives the largest sample size. See below under **More information** if this is confusing.

This is the minimum recommended size of your survey. If you create a sample of this many people and get responses from everyone, you're more likely to get a correct answer than you would from a large sample where only a small percentage of the sample responds to your survey.

Online surveys with Vovici have completion rates of 66%!

Alternate scenarios							
With a sample size of	100	200	300	With a confidence level of	90	95	99
Your margin of error would be	5.21%	1.75%	0.00%	Your sample size would need to be	40	53	78

Save effort, save time. Conduct your survey online with Vovici.

Teknik perhitungan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sample size calculator*. Jumlah sampel yang diperlukan dihitung berdasarkan aplikasi *sample size calculator* Raosoft.com (Memon et al., 2020). Dengan perhitungan 10% *margin of error*, 90% *confidence level*, 229 *population*, dan 23% *response distribution*, sehingga sampel yang diperlukan untuk menyatakan penelitian ini valid sebanyak 40 sampel

3.4 Data Dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan secara langsung melalui menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan perangkat desa di kantor desa Kecamatan Diwek.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah alat penelitian atau survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari sekelompok orang terpilih, baik melalui wawancara pribadi atau melalui surat (KBBI). Menurut Sugiyono (2019) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden

atau meminta tanggapan tertulis. Responden langsung mengisi kuesioner dengan menandai jawaban yang diberikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam dari responden atau menemukan permasalahan awal dalam sebuah studi (Sugiyono, 2019b). Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada tiga sekretaris desa untuk memvalidasi jawaban pada kuesioner. Pertanyaan wawancara diajukan dari salah satu tiap konteks yang ada pada pernyataan kuesioner.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok masyarakat terhadap fenomena sosial. Jawaban setiap poin instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative. Berikut skala likert yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (S)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2019)

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang dapat menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Menurut (Sugiyono, 2019) variabel penelitian adalah segala bentuk penelitian yang ditentukan oleh peneliti mengenai informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang ditarik. Peneliti mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi tiga kelompok, yaitu variabel independen (X), variabel dependen (Y), dan variabel

mediasi (Z). Hal ini sesuai dengan judul penelitian yang membahas tentang hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan sistem pengendalian internal dan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Menurut Sugiyono (2019) variabel bebas merupakan variabel yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan variabel terikat (terikat). Menurut Sugiyono (2019) keberadaan variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini Variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (Y), sedangkan faktor independennya adalah sistem pengendalian internal (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), dan penggunaan teknologi informasi (Z) sebagai variabel mediasi. Berikut ini adalah uraian masing-masing variabel penelitian tersebut:

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Sistem Pengendalian Internal (Dimas et al., 2018) (Shofa et al., 2022)	Untuk menjamin keselamatan dan efisiensi organisasi serta memastikan bahwa operasinya dilaksanakan sesuai dengan program, kebijakan manajemen, dan tujuannya, pemerintah telah menetapkan sistem pengendalian internal. Sistem ini terdiri dari prosedur, struktur organisasi, dan metode	1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian Risiko 3) Kegiatan Pengendalian 4) Informasi dan Komunikasi 5) Pemantauan
2	Kualitas Sumber Daya Manusia (Agustiawan et al., 2021b) (Puspita et al., 2021)	Kualitas sumber daya manusia suatu organisasi merupakan faktor kritis yang memengaruhi produktivitas setiap individu pekerja. Selain memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dan sikap yang baik, setiap pegawai harus mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.	1) Pengetahuan (Knowledge) 2) Keterampilan (Skill) 3) Sikap (Attitude)
3	Kualitas Laporan	Kualitas laporan keuangan daerah merupakan salah satu	1) Relevan 2) Andal

	Keuangan Pemerintah Daerah (Ningrum, 2018) (Helmi & Renil, 2021)	tolak ukur normatif yang harus dipenuhi oleh laporan informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya.	3) Dapat Dibandingkan 4) Dapat Dipahami
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi (Hadis, 2022)	Untuk membuat informasi keuangan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat dan memberikan layanan kepada mereka, teknologi informasi bertujuan untuk menangani data, informasi, dan proses kerja secara elektronik.	1) Perangkat 2) Pengelolaan Data Keuangan 3) Perawatan

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yaitu PLS (*Partial Least Square*) dan data diolah dengan menggunakan program Smart PLS 4.0. *Partial Least Squares* (PLS) merupakan teknik analisis yang ampuh karena menghilangkan asumsi regresi OLS (*Ordinary Least Squares*), seperti mengharuskan data bersifat multivariat dan terdistribusi normal, dan tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel eksogen, yang sering disebut dengan soft modeling (Wold 1985). Pada dasarnya, Wold mengembangkan PLS untuk menguji teori yang lemah dan data yang lemah, seperti ukuran sampel yang kecil dan masalah normalitas data.

Menurut (Ghozali & Latan, 2015) model pengukuran PLS terdiri dari model pengukuran (outer model), kriteria Goodness Of Fit (GoF) dan model struktural (inner model). PLS merupakan model persamaan SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component-based structural equation modelling*. Tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi).

Model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur, adapun beberapa kelebihan yang didapat jika menggunakan model analisis PLS yaitu data tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak harus berdasarkan pada teori dan adanya *indeterminancy*, dan jumlah sampel yang kecil. PLS didefinisikan salah satu metode yang dapat menjawab masalah pengukuran indeks kepuasan karena PLS tidak memerlukan asumsi yang ketat, baik mengenai sebaran dari perubahan pengamatan maupun dari ukuran contoh yang tidak besar (Ghozali & Latan, 2015).

Software untuk menganalisis SEM *component based* PLS yang telah dikembangkan di *University of Humburg* Jerman diberi nama SMARTPLS.

Kemudian ada beberapa tahapan analisis PLS-SEM yaitu sebagai berikut:

1. Konseptualisasi Model

Konseptualisasi model merupakan langkah awal dalam analisis PLS-SEM. Pada tahap ini peneliti harus melakukan pengembangan dan pengukuran konstruk. Menurut Churchill (1979) terdapat delapan tahapan prosedur yang harus dilewati dalam pengembangan dan pengukuran konstruk yaitu:

- a. Spesifikasi dominan konstruk
- b. Tentukan item yang mempresentasikan konstruk
- c. Pengumpulan data untuk dilakukan uji pretest
- d. Purifikasi konstruk
- e. Pengumpulan data baru
- f. Uji reliabilitas
- g. Uji validitas
- h. Tentuka skor pengukuran konstruk

1. Menentukan Metode Analisis *Algorithm*

Metode penelitian ini yang sudah melewati tahapan konseptualisasi model selanjutnya harus ditentukan metode analisis *algorithm* apa yang akan digunakan untuk estimasi model. Dalam PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 4.0, metode analisis *algorithm* yang disediakan hanyalah *algorithm* PLS dengan tiga pilihan skema yaitu *factorial*, *centroid* dan *path* atau *structural whitening*.

2. Menentukan Metode Resampling

Umumnya terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti dibidang SEM untuk melakukan proses penyempelan kembali (*resampling*) yaitu *bootstrapping* dan *jackknifing*.

Jadi metode *bootstrapping* menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan *resampling* kembali. Metode ini lebih sering digunakan dalam model persamaan struktural. Program SmartPLS 4.1.0.3 hanya menyediakan satu metode *resampling* yaitu *bootstrapping* dengan tiga pilihan yaitu *No Sign Changes*, *Individual Sign Changes* dan *Construct Level Changes*.

3. Menggambar Diagram Jalur

Dalam menggambar diagram jalur (*path diagram*), menggunakan prosedur *nomogram reticular action modelling* (RAM) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Konstruk teoritikal yang menunjukkan variabel laten harus digambar dengan bentuk lingkaran atau bulatan elips (*circle*).
- b. *Variable observed* atau indikator harus digambar dengan bentuk kotak (*squares*)
- c. Hubungan-hubungan asimetri digambarkan dengan arah panah Tunggal
- d. Hubungan-hubungan simetris digambarkan dengan arah panah *double*

4. Evaluasi Model

Evaluasi model dalam PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 4.0 dapat dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model yaitu analisis faktor konfirmatori atau dengan menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural dan pengujian signifikan untuk menguji pengaruh antar konstruk atau variabel.

3.7.2 Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model adalah spesifikasi hubungan antara variabel laten dan indikatornya, disebut juga hubungan eksternal atau model pengukuran, yang mendefinisikan karakteristik suatu konstruk yang mencakup variabel manifes. Menurut Ghazali dan Latan (2015), pengujian model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau *observed* variable mempresentasi variabel laten untuk diukur. Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk uji validitas dan reliabilitas model.

1. Uji Validitas

Menurut Ghazali dan Latan (2015) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya kuesioner. Uji validitas ini perlu dilakukan guna mengetahui apakah alat ukur yang disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Pengukuran ini dilakukan karena penyusunan angket penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan atas konstruksi teoritik masing-masing variabel penelitian. Kemudian dari variabel tersebut dicari indikatornya, selanjutnya dijabarkan pada setiap item dalam angket. Terdapat dua kriteria untuk menilai uji validitas dalam outer model yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*.

a. Convergen Validity (Validitas Konvergen)

Validitas konvergen dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau indikator dengan *score* konstraknya. Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor. Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah outer loading > 0.7 , communality > 0.5 dan average variance extracted (AVE) (Abdillah & Hartono, 2015).

b. Discriminant Validity (Validitas Diskriminan)

Validitas diskriminan dari model pengukuran dengan refleksi indikator dapat dilihat berdasarkan *cross loading* antara dengan konstraknya. Apabila korelasi konstruk dengan pengukuran lebih tinggi daripada pengukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada blok lainnya. Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan

akar AVE (*Average Variance Extracted*) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai *discriminant validity* yang cukup besar jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (Abdillah & Hartono, 2015).

2. Uji Reliability (Relabilitas)

Menurut Ghazali dan Latan (2015) reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dipercaya apabila jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam survei tersebut konsisten atau stabil sepanjang waktu. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan *Cronbach Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghazali (2016). Cronbach Alpha adalah patokan yang digunakan untuk mendeskripsikan korelasi atau hubungan antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Koefisien cronbach alpha $> 0,70$ maka pertanyaan dinyatakan reliabel atau valid. Besarnya reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

Keterangan :

k = Jumlah butir kuesioner

α = Koefisien keterandalan butir kuesioner

$\sum S_i^2$ = Jumlah variasi skor butir yang valid

S_t^2 = Variasi total skor butir

Uji yang dilakukan diatas merupakan uji pada *outer* model untuk indikator reflektif. Untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang berbeda. Uji untuk indikator formatif yaitu:

- a. *Significance of weights*. Nilai *weight* indikator formatif dengan konstruksya harus signifikan.

- b. *Multicollinearity*. Uji *multicollinearity* dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif mengalami *multicollinearity* dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF < 10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut tidak terjadi *multicollinearity*.

3.7.3 Uji Model Struktural (Inner Model)

Menurut (Abdillah & Hartono, 2015) Inner Model menggambarkan hubungan kualitas antara variabel laten yang dibangun berdasarkan substansi teori. Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kualitas antara variabel laten.

a. R-Square

Model struktural dalam structural PLS dievaluasi dengan menggunakan nilai R^2 untuk variabel dependen nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Nilai R^2 merupakan uji *goodness-fit model*. Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen relatif terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi berarti model prediksi yang lebih baik untuk model penelitian yang diusulkan. (Abdillah & Hartono, 2015). Nilai R^2 yaitu 0,25 (rendah), 0,50 (sedang), 0,75 (kuat)

b. Predictive Relevance (Q^2)

Menurut Setiawan (2022), Predictive Relevance (Q^2) untuk memvalidasi model konstruk endogen. Nilai Q^2 pada variabel endogen dikatakan baik (*fit model*) bila nilainya > dari variabel eksogen. Nilai Q^2 yaitu 0,02 (rendah), 0,15 (sedang), 0,35 (kuat).

3.7.4 Pengujian Mediasi

Menurut (Sekaran & Bougie, 2013), variabel mediasi atau intervening merupakan variabel perantara, yang berfungsi untuk memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji mediasi dilakukan guna mengetahui kedudukan variabel mediasi di dalam model. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, perlu dilakukan pengujian nilai t dari koefisien ab. Kemudian nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila

nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ maka dapat dikatakan adanya pengaruh mediasi. Selanjutnya dilakukan penglihatan terhadap terhadap sifat hubungan antara variabel baik sebagai variabel mediasi sempurna atau mediasi parsial atau bukan sebagai variabel mediasi. Metode yang dilakukan untuk memeriksa variabel mediasi adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependent pada model dengan menyertakan variabel mediasi
2. Membuktikan pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen tanpa menyertakan variabel mediasi.
3. Membuktikan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel mediasi.
4. Membuktikan pengaruh antara variabel mediasi terhadap variabel dependen (Alfath, 2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

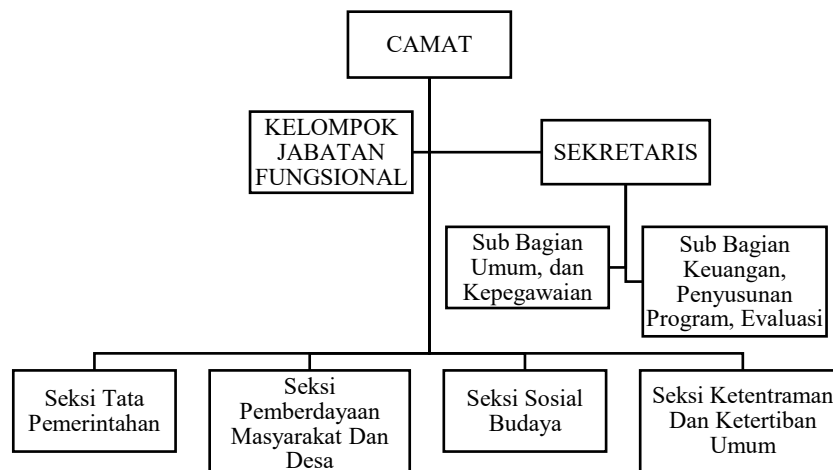
4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Diwek sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Jombang merupakan unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung. Kecamatan Diwek terletak di antara sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto, di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Mojowarno, di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Perak, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gudo dan terbentang pada $7^{\circ} 24' 0''$ - $07^{\circ} 24' 0''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 20' 0''$ - $112^{\circ} 30' 0''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Diwek sebesar 47,70 km persegi. Kecamatan Diwek merupakan kawasan yang strategis karena memiliki jalur transportasi yang menghubungkan beberapa kota terkenal. Seperti ke arah Utara maka akan menuju kabupaten Lamongan, dan jika ke Selatan akan menuju kota Kediri dan Malang. Wilayah Kecamatan Diwek memiliki 20 Desa, yang terbagi menjadi 80 Dusun, 183 Rukun Warga (RW), 665 Rukun Tetangga (RT) dan memiliki penduduk sebanyak 112.827 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 56.900 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 55.927 jiwa.

4.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



4.1.3 Tugas dan Fungsi Kecamatan Diwew

1) Camat

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, Pembangunan dan pemerintahan, pertanian, social budaya, lingkungan hidup dan pertanahan.
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan,
- d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama.
- e. Penyelenggaraan perencanaan program Pembangunan dan perekonomian produksi, pertanian, kesejahteraan social, lingkungan hidup dan social budaya di lingkungan Kecamatan.
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan.
- i. Penyusunan program, ketata usahaan dan rumah tangga Kecamatan.

2) Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan.
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan.
- f. Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset.
- g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
- h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan.
- i. Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat.

3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu Sekretaris untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Diwek. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
- b. Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas.
- c. Menyelenggarakan penyediaan, pembinaan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor.
- e. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas.
- f. Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai.
- g. Mengumpulkan, Menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana.
- h. Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK) dan Analisa kebutuhan pegawai.

4) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi adalah membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Diwek. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan.
- b) Menyusun rencana keuangan, program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan.
- c) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- d) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

5) Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- b) Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- c) Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya.
- d) Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa.
- e) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

- g) Penyelenggaraan kegiatan PATEN.
- h) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan.
- i) Pelaksanaan tugas pembantuan.

6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.
- b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.
- c) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta.
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat.
- f) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat.
 - b) Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - c) Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan Masyarakat.
 - d) Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan.
 - e) Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan.
 - f) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - h) Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
 - i) Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat.
- 8) Seksi Sosial Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya.
- b) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya.
- c) Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya.
- d) Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat.
- e) Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.
- f) Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.

Tabel 4. 1 Daftar Desa Yang Menjadi Responden

No	Nama Desa
1	Desa Balong Besuk
2	Desa Bandung
3	Desa Bendet
4	Desa Brambang
5	Desa Bulurejo
6	Desa Ceweng
7	Desa Cukir
8	Desa Diwek
9	Desa Grogol
10	Desa Jatipelem
11	Desa Jatirejo
12	Desa Kayangan
13	Desa Kedawung
14	Desa Keras
15	Desa Kwaron
16	Desa Ngudirejo
17	Desa Pandanwangi
18	Desa Pundong

19	Desa Puton
20	Desa Watugaluh

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Usia, jenis kelamin, Pendidikan terakhir, dan jabatan adalah karakteristik responden dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 perangkat desa, berikut merupakan hasil analisis karakteristik responden:

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	28	70%
Perempuan	12	30%
Total	40	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Terlihat pada tabel 4.2 bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan. Responden laki-laki berjumlah 70% atau 28 responden sedangkan jumlah responden perempuan 30% atau 12 responden.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA	11	27.5%
S-1	29	72.5%
Total	40	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Terlihat pada tabel 4.3 terlihat bahwa responden penelitian paling banyak dengan Pendidikan S-1 sebanyak 72,5% atau 29 responden, Pendidikan SMA sebanyak 27,5% atau 11 responden.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
21-30 Tahun	3	7.5%

31-40 Tahun	5	12.5%
41-50 Tahun	24	60%
>50 Tahun	8	20%
Total	40	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Terlihat pada tabel 4.4 terlihat bahwa responden penelitian ini adalah usia 21-30 tahun sebanyak 7,5% atau 3 responden untuk usia 31-40 tahun sebanyak 12,5% atau 5 responden, untuk usia 41-50 tahun sebanyak 60% atau 24 responden dan sisanya umur >50 tahun sebanyak 20% atau 8 responden.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Persentase
Kepala Desa	20	50%
Kaur Keuangan	20	50%
Total	40	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Terlihat pada tabel 4.5 jabatan yang diambil pada penelitian ini ada dua yang pertama Kepala Desa sebanyak 50% atau 20 responden. Kedua Kaur Keuangan sebanyak 50% atau 20 responden.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jabatan

Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jabatan

Lama Jabatan	Jumlah Responden	Persentase
1-5 Tahun	0	0%
6-10 Tahun	27	67.5%
11-15 Tahun	8	20%
16-20 Tahun	1	2.5%
>20 Tahun	4	10%
Total	40	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Terlihat pada tabel 4.6 bahwa responden penelitian ini adalah lama jabatan 1-5 tahun sebanyak 0% atau 0 responden, untuk lama jabatan 6-10 tahun sebanyak 67,5% atau 27 responden, untuk lama jabatan 11-15 tahun sebanyak 20% atau 8 responden, untuk lama jabatan 16-20 tahun sebanyak

2,5% atau 1 responden, dan sisanya untuk lama jabatan >20 tahun sebanyak 10% atau 4 responden,

4.3 Evaluasi Outer Model (Measurement Model)

Evaluasi outer model (measurement model) merupakan tahap awal dalam uji penelitian yang menerapkan penggunaan metode Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konstruk dengan variabel indikator melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1 Uji Validitas

4.3.1.1 Convergent Validity

Untuk menguji convergent validity digunakan nilai outer loadings dan nilai Average Variance Extracted (AVE). Tabel berikut adalah nilai loading factor dari indikator-indikator yang telah diolah oleh peneliti.

Tabel 4. 7 Nilai Loading Faktor

Variabel	Indikator	Loading Factor	Tanda	Batas	Hasil Uji
Sistem Pengendalian Internal	X1.1	0.706	>	0.7	Valid
	X1.2	0.802	>	0.7	Valid
	X1.3	0.803	>	0.7	Valid
	X1.4	0.814	>	0.7	Valid
	X1.5	0.909	>	0.7	Valid
	X1.6	0.798	>	0.7	Valid
	X1.7	0.796	>	0.7	Valid
	X1.8	0.78	>	0.7	Valid
	X1.9	0.781	>	0.7	Valid
	X1.10	0.808	>	0.7	Valid
Kualitas Sumber Daya Manusia	X2.1	0.933	>	0.7	Valid
	X2.2	0.767	>	0.7	Valid
	X2.3	0.86	>	0.7	Valid
	X2.4	0.765	>	0.7	Valid
	X2.5	0.833	>	0.7	Valid
	X2.6	0.866	>	0.7	Valid
Pemanfaatan	Z1	0.887	>	0.7	Valid

Teknologi Informasi	Z2	0.784	>	0.7	Valid
	Z3	0.823	>	0.7	Valid
	Z4	0.737	>	0.7	Valid
	Z5	0.896	>	0.7	Valid
	Z6	0.798	>	0.7	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y1	0.763	>	0.7	Valid
	Y2	0.916	>	0.7	Valid
	Y3	0.815	>	0.7	Valid
	Y4	0.78	>	0.7	Valid
	Y5	0.799	>	0.7	Valid
	Y6	0.861	>	0.7	Valid
	Y7	0.849	>	0.7	Valid
	Y8	0.719	>	0.7	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, uji convergent validity menunjukkan bahwa semua indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai > 0.70 . Sehingga dapat dinyatakan bahwa data telah valid dan layak digunakan untuk penelitian berikutnya.

4.3.1.2 Discriminant Validity

Setelah uji validitas konvergen, langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas diskriminan menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dapat dianggap memenuhi syarat jika nilai cross loading pada variabelnya lebih tinggi daripada nilai cross loading pada variabel lainnya. Uji validitas diskriminan, yang sering dikenal sebagai uji cross loading, terdiri dari dua bagian. Hasil uji cross loading disajikan dalam bagian berikut:

Tabel 4. 8 Nilai Cross Loading

Item	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Internal
X1.1	0.664	0.622	0.544	0.706
X1.10	0.849	0.731	0.797	0.808
X1.2	0.753	0.651	0.691	0.802

X1.3	0.676	0.627	0.618	0.803
X1.4	0.665	0.59	0.684	0.814
X1.5	0.81	0.723	0.758	0.909
X1.6	0.799	0.706	0.733	0.798
X1.7	0.723	0.824	0.589	0.796
X1.8	0.673	0.554	0.61	0.78
X1.9	0.723	0.726	0.646	0.865
X2.1	0.858	0.933	0.762	0.768
X2.2	0.702	0.767	0.597	0.647
X2.3	0.815	0.86	0.726	0.822
X2.4	0.796	0.765	0.737	0.711
X2.5	0.691	0.833	0.623	0.646
X2.6	0.679	0.866	0.547	0.577
Y.1	0.763	0.684	0.708	0.698
Y.2	0.916	0.881	0.854	0.824
Y.3	0.815	0.707	0.757	0.778
Y.4	0.78	0.853	0.675	0.751
Y.5	0.799	0.655	0.767	0.76
Y.6	0.861	0.814	0.802	0.71
Y.7	0.849	0.726	0.753	0.77
Y.8	0.719	0.571	0.626	0.643
Z.1	0.798	0.663	0.887	0.68
Z.2	0.69	0.624	0.784	0.618
Z.3	0.685	0.578	0.823	0.703
Z.4	0.639	0.581	0.737	0.576
Z.5	0.875	0.806	0.896	0.751
Z.6	0.794	0.677	0.798	0.755

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa pada masing-masing indikator telah memenuhi diskriminan validity, hal ini terbukti dari adanya nilai outer loading > 0.70 yang ada disetiap variabel.

4.3.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menentukan keterkaitan faktor pada tes dengan faktor lainnya. Berdasarkan uji reliabilitas dapat dikatakan memenuhi

syarat apabila nilai variabel laten yang diujikan harus bernilai lebih besar dari 0.70 baik itu nilai Cronbach's alpha maupun nilai composite reliability. Berikut adalah hasil pengolahan data berdasarkan nilai Cronbach's alpha dan composite reliability:

Tabel 4. 9 Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Tanda	Batas	Hasil Uji
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.915	0.934	>	0.7	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.941	0.95	>	0.7	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.903	0.926	>	0.7	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.927	0.94	>	0.7	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.9, seluruh variabel yang diuji memiliki nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang lebih besar dari 0.70 sehingga seluruh variabel yang diuji dinyatakan reliabel dan masing- masing indikator sanggup mewakili variabelnya sendiri.

4.4 Evaluasi Inner Model (Structural Model)

Evaluasi *inner model (structural model)* merupakan tahap kedua dalam uji penelitian yang menerapkan penggunaan metode *Partial Least Square - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Evaluasi ini bertujuan untuk memprediksi hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara variabel melalui R^2 value (*Coefficient of Determination*).

a) R^2 Value (Coefficient of Determination)

Coefficient of Determination (R^2) merupakan ukuran proporsi variansi konstruk endogen yang dijelaskan oleh konstruk prediktornya. Ini menunjukkan

kekuatan penjelas model sehubungan dengan konstruksi endogen tertentu. Nilai R^2 berada pada rentang nilai 0 sampai dengan 1 yang mana pada nilai 0.25 mengartikan Tingkat keakuratan prediksi yang lemah; 0.50 mengartikan sedang; 0.75 mengartikan kuat. Berikut merupakan rincian hasil pengolahan uji R^2 value (*Coefficient of Determination*)

Tabel 4. 10 Nilai R Square dan R Square Adjusted

Variabel	R Square	Adjusted R Square
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.944	0.940
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.729	0.715

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dibahas sebelumnya, nilai R^2 (R Square) dari model regresi digunakan untuk menentukan tingkat penjelasan yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 sebesar 0,729 untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa perubahan pada kedua variabel independen (kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal) dapat menjelaskan 72,9% varians dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi. Data yang ditampilkan di sini berasal dari tabel di atas. Faktor-faktor di luar cakupan studi ini menjelaskan 100% sisanya (72,9% dikurangi 100%). Nilai R^2 sebesar 0,944 untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa tiga variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, mampu menjelaskan 94,4% variasi variabel tersebut. Sisanya sebesar 100% (94,4% dikurangi 100%) atau 5,6%, dijelaskan oleh faktor-faktor di luar cakupan penelitian ini.

b) Predictive Relevance Q^2

Pengujian Q^2 melakukan pengujian relevansi prediktif dari model yang kompleks dengan menggunakan prosedur *blindfolding*. *Blindfolding* adalah penggunaan indikator sampel yang menghilangkan setiap titik data ke dalam

indicator konstruk endogen dan mengestimasi parameter dengan titik data yang tersisa. *Predictive Relevance Q²* dapat dikatakan memenuhi syarat dan diterima apabila nilai Q^2 harus lebih besar dari 0 sehingga menunjukkan bahwa model tersebut memiliki relevansi prediktif pada suatu model. Sebaliknya, apabila Q^2 bernilai 0 atau di bawahnya maka tidak menunjukkan adanya relevansi prediktif pada suatu model. Dibawah ini merupakan rincian pengolahan uji *Predictive Relevance Q²*

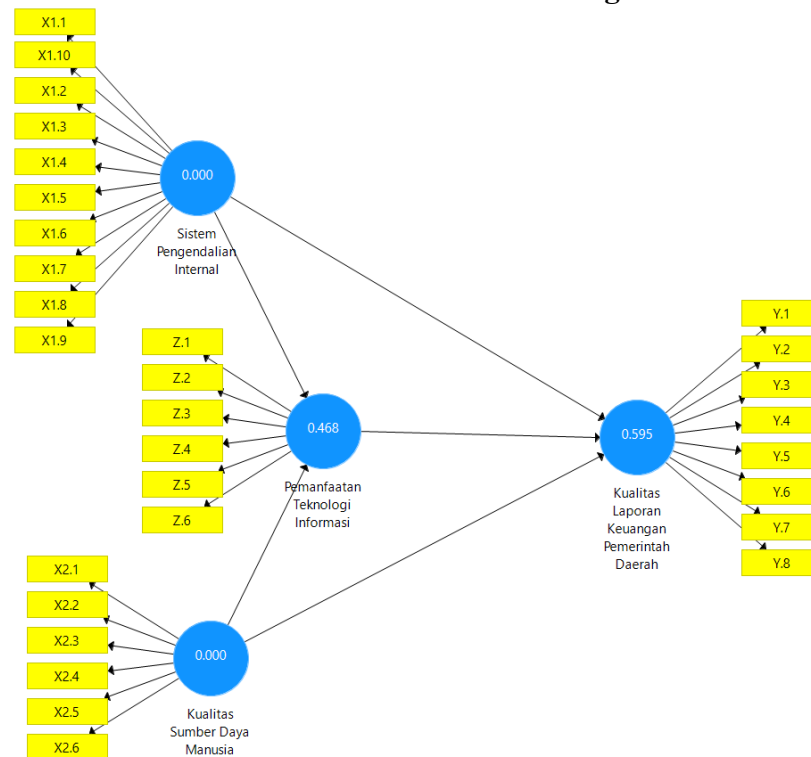
Tabel 4. 11 Nilai Q^2 Predict

Variabel	Q^2 Predict	Hasil Uji
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.468	Relevan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.595	Relevan

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Menurut data yang terdapat pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai Q^2 sebesar 0.468 atau 46.8% sedangkan untuk Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai Q^2 sebesar 0.595 atau 59.5% yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0 yang berarti kedua variabel menunjukkan adanya relevansi prediktif. Berikut merupakan model penelitiannya.

Gambar 4. 2 Model Blindfolding



Sumber : Data Primer diolah, 2024

4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menunjukkan hubungan yang telah dihipotesiskan dengan praktik simulasi. Uji hipotesis dilakukan dengan teknik *bootstrapping*. Data yang digunakan untuk *bootstrapping* adalah data yang sudah dilakukan dalam tahapan *measurement*. Untuk tahap uji hipotesis berpacu terhadap tiga tahapan yaitu *path coefficient (original sample)*, *t-statistics*, dan *p-value*. Berikut adalah rincian ketentuan dari masing-masing tahapan:

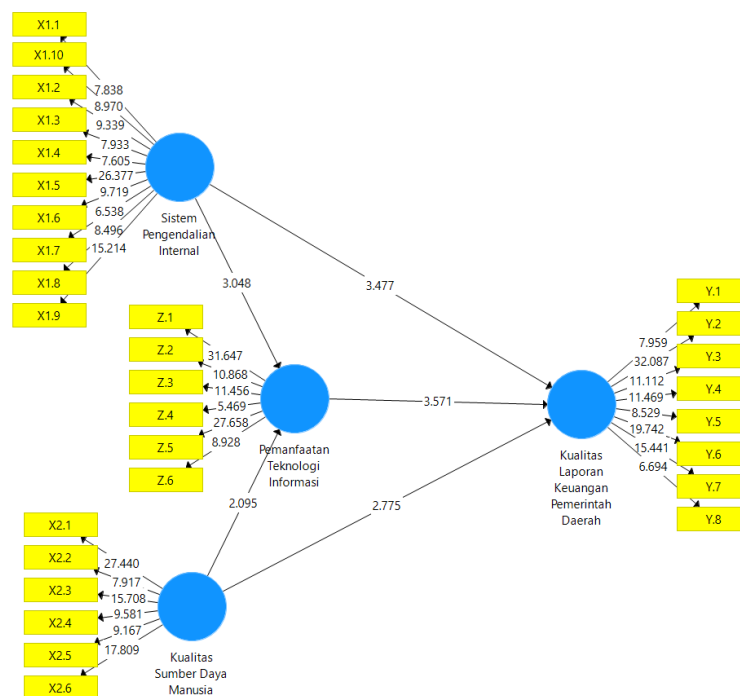
- Pada nilai *path coefficient (original sample)* hasil yang memiliki tanda +1 mewakili hubungan positif yang kuat antar variabel, begitu juga sebaliknya jika hasil nilai *path coefficient* memiliki tanda -1 mewakili nilai negatif yang kuat antar variabel.
- Pada Tingkat signifikan atau α (*alpha*) sebesar 5% (0,05) suatu variabel laten dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel laten lainnya apabila nilai *t-statistics* bernilai sebesar >1.96 . Sementara *t-statistics* yang bernilai

<1.96 berarti bahwa antar variabel laten yang diuji kurang berpengaruh signifikan.

- c. Pada nilai *p-value* yang kurang dari 0.05 dinyatakan bahwa variabel yang satu dapat mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan nilai *p-value* yang lebih besar dari 0.05 dinyatakan bahwa variabel yang satu tidak berpengaruh terhadap variabel yang lainnya.

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis akan dilakukan guna untuk mengetahui pengaruh langsung antar variabel. Berikut merupakan model penelitiannya:

Gambar 4. 3 Model Bootstrapping



Sumber : Data Primer diolah, 2024

Tabel 4. 12 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Uji Pengaruh Langsung	Original Sampel	T Hitung	P- Value	Ket.	Keputusan
SPI → KLPD	0.297	3.477	0.001	Signifikan	H1 diterima
KSDM → KLPD	0.354	2.775	0.006	Signifikan	H2

					diterima
SPI → PTI	0.534	3.048	0.002	Signifikan	H3 diterima
KSDM → PTI	0.355	2.095	0.037	Signifikan	H4 diterima
PTI → KLKPD	0.385	3.571	0.000	Signifikan	H5 diterima

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Data yang dapat dilihat pada tabel 4.12 dapat digunakan untuk pengujian hipotesis yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 3.477 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.001 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.297 mengartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 2.775 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.006 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.354 mengartikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengujian Sistem Pengendalian Internal terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 3.048 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.002 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.534 mengartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara positif terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

4) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 2.095 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.037 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.355 mengartikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi.

5) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 3.571 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.000 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.385 mengartikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Uji Pengaruh Tidak Langsung	Original Sampel	T Hitung	P- Value	Ket.	Keputusan
SPI → PTI KLKPD	0.205	2.058	0.040	Signifikan	H6 diterima
KSDM → PTI KLKPD	0.137	2.200	0.028	Signifikan	H7 diterima

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Data yang dapat dilihat pada tabel 4.13 dapat digunakan untuk pengujian hipotesis yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengujian Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 2.058 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.040 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan demikian maka dapat diputuskan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mampu memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 2.200 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.028 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan demikian maka dapat

diputuskan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mampu memediasi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Di Kecamatan Diwek, Jombang, diperoleh hasil sebagai berikut dari uji hipotesis tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui mediasi teknologi informasi:

4.6.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 3.477 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.001 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.297 mengartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Simpulan penelitian ini bahwa sistem pengendalian intern yang efektif mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas dkk. (2018) dan Fathia dkk. (2020). Sistem pengendalian internal telah dirancang untuk mengalisa sistem pengendalian internal yang sudah layak dan dapat menemukan adanya kelemahan. Jika suatu organisasi dapat mengendalikan aktivitasnya, maka organisasi tersebut akan mampu memberikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Dengan menyediakan format yang jelas, mudah dan sederhana, pegawai dapat dengan mudah membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas dan relevan. Semakin baik proses pengendalian internal organisasi akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam islam sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan diterapkan oleh Rasulullah SAW didakwahkan secara terang-terangan dan dilanjut oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada QS An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa ayat 58)

QS An-Nisa ayat 58 memerintahkan kaumnya untuk bersifat amanah dan adil dalam mengambil keputusan dan transparan. Amanah yang mencakup pengelolaan keuangan dan sumber daya secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bermaksud untuk tetap mengontrol atau mengendalikan kinerja organisasi atau perusahaan dan transparan atau dapat diakses dan mudah dipahami.

Sekretaris desa Bulurejo, Ngudirejo dan Watugaluh mengatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di pemerintah daerah sudah berjalan cukup baik melalui pemisahan tugas, pengawasan, dan prosedur administrasi yang jelas. Narasumber menegaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan karena memastikan pencatatan lebih akurat, transparan, dan sesuai standar. Setiap transaksi wajib memiliki bukti yang sah serta diawasi pejabat berwenang sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, masih terdapat tantangan berupa kurang konsistennya pelaksanaan dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga

peningkatan kompetensi aparatur tetap diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian dan mutu laporan keuangan.

4.6.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa dampak HRQ terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah signifikan secara statistik dengan nilai t-statistik sebesar 2,775 (lebih tinggi dari 1,96) dan nilai p sebesar 0,006 (lebih rendah dari 0,05). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap mutu laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah, karena nilai sampel awal sebesar 0,354 tercapai.

Analisis saat ini sejalan dengan penelitian lain yang menemukan hubungan yang menguntungkan antara sumber daya manusia berkualitas tinggi dengan laporan keuangan berkualitas tinggi dari pemerintah daerah (Puspita et al., 2021; Fathia et al., 2020). Kesimpulan kedua juga didukung oleh penelitian tersebut. Menurut penelitian (Arif et al., 2023), sumber daya manusia memang memengaruhi keakuratan laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa responden penelitian ini pada dasarnya menyadari bahwa dengan memiliki kemampuan yang baik dibidangnya khususnya bidang akuntansi akan membantu dalam penyelesaian pekerjaannya yang berdampak pula pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Setiap pegawai harus memiliki informasi yang tepat, keterampilan khusus, dan sikap yang baik untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Manajemen pemerintahan berkewajiban untuk memberikan layanan yang menguntungkan prinsipal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Puspita et al. (2021).

Dalam islam kualitas sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dalam konteks pengelolaan amanah publik. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada QS Al-Qashash ayat 26, yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

"Salah satu dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang terbaik yang engkau ambil untuk bekerja adalah yang kuat (kompeten) dan amanah (dapat dipercaya).'" (QS. Al-Qashash: 26)

Dalam QS Al-Qashash ayat 26 memberikan prinsip dalam manajemen sumber daya manusia yaitu pentingnya memilih orang yang mempunyai kekuatan (kompeten) dan integritas (amanah). Pada laporan keuangan pemerintah daerah kedua prinsip tersebut sangat menentukan kualitas laporan. Hal ini selaras dengan prinsip islam bahwa pengelolaan harta publik adalah amanah yang harus dijaga dengan baik.

Sekretaris desa Bulurejo, Ngudirejo dan Watugaluh menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia di desa dinilai cukup baik, terutama yang bertugas di bidang administrasi dan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia terbukti sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan, di mana pegawai yang terampil mampu menyusun laporan secara teliti, akurat, dan sesuai standar pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas, perangkat desa rutin mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dari pemerintah daerah. Upaya ini berdampak positif karena laporan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa maupun daerah

4.6.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi menghasilkan nilai t-statistik sebesar 2,095 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.355 mengartikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh

secara positif terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang memiliki peranan sebagai steward harus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai *principal*. Pelayanan terbaik tersebut dapat terwujud apabila pemerintah melakukan segala pekerjaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal (Arif et al., 2023). Pemanfaatan secara optimal dapat disertai dengan sistem pengendalian internal sehingga setiap instansi dapat menggunakan teknologi informasi sesuai dengan aturan serta kebutuhannya, Dimana sistem pengendalian internal dan teknologi menjadi satu kesatuan.

Dalam islam sistem pengendalian internal perlu mengelola pemanfaatan teknologi informasi agar tidak disalahgunakan, menimbulkan mudarat atau merugikan orang lain. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ... وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu... dan janganlah kamu jemu menuliskannya (transaksi itu)..." (QS Al-Baqarah [2] 282)

Dalam QS Al-Baqarah (2):282 menegaskan bahwa pentingnya pencatatan, keakuratan, verifikasi, akuntabilitas dan perlindungan hak-hak pihak terkait. Semua transaksi digital harus tercatat dengan lengkap dan akurat. Sistem teknologi informasi harus dilengkapi dengan mekanisme sistem pengendalian internal meliputi otorisasi, audit trail, kontrol akses, dan validasi data.

Sekretaris desa Bulurejo, Ngudirejo dan Watugaluh menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di desa telah berjalan melalui pemisahan

tugas, pemeriksaan berkala, serta pencatatan yang terdokumentasi dengan baik. Mekanisme ini berpengaruh positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi, karena penggunaan aplikasi resmi seperti Siskeudes menjadi lebih tertib, terarah, dan sesuai prosedur. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan rutin perangkat, jaringan internet, serta pembaruan aplikasi dan antivirus, ditambah pemeriksaan dari pihak kecamatan maupun inspektorat. Meski masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan kondisi jaringan internet yang kurang stabil, sistem pengendalian internal dinilai mampu menjaga agar teknologi informasi tetap dimanfaatkan sesuai aturan dan mendukung kelancaran pengelolaan administrasi maupun keuangan desa.

4.6.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 2.095 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.037 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu diperoleh nilai *original sample* sebesar 0.355 mengartikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Teknologi Informasi memiliki dampak yang lebih besar pada organisasi yang berada dalam lingkungan yang dinamis. Hal ini akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas Sumber Daya Manusia yang lebih besar. Teknologi di sektor informasi berpotensi untuk mendukung HRD (pengembangan sumber daya manusia melalui akuisisi pengetahuan). Jika SDM memiliki keahlian TI yang tepat, mereka dapat mengelola data dengan cepat dan efektif, yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dan pemrosesan transaksi dapat memperoleh manfaat dari penerapan teknologi informasi yang tepat untuk memfasilitasi penyusunan laporan keuangan berkualitas tinggi (Shofa et al., 2022).

Dalam islam karena Allah SWT maha teliti, sumber daya manusia dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengelola data, informasi dan sistem sesuai dengan perkembangan teknologi di zaman modern. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada QS Al-Mujadilah ayat 11, yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَانْشُرُوا ۚ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: 'Berilah kelapangan dalam majelis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu', maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Mujadilah [58]:11)

Dalam QS Al-Mujadilah ayat 11 mengajarkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah mereka yang beriman, berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Ilmu teknologi informasi yang dikuasai sumber daya manusia akan meningkatkan derajat organisasi dan bangsa. Pemanfaatan teknologi informasi harus didasari dengan iman, etika dan akuntabilitas agar tidak disalahgunakan.

Sekretaris desa Bulurejo, Ngudirejo dan Watugaluh menjelaskan bahwa perangkat desa yang memiliki kompetensi memadai mampu mengoperasikan aplikasi resmi seperti Siskeudes dengan lebih efektif, sehingga pencatatan dan pelaporan berjalan cepat, akurat, dan sesuai prosedur. Sebaliknya, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia seringkali menghambat pemanfaatan teknologi dan menyebabkan keterlambatan input data. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah secara rutin memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan, sementara perangkat desa juga saling membantu. Upaya peningkatan kompetensi ini terbukti berdampak positif, karena pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih optimal, administrasi keuangan tertib, serta pelayanan kepada masyarakat lebih transparan.

4.6.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Setelah menganalisis data dan mengevaluasi hipotesis, t-statistik untuk pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 3.571, yang lebih besar dari 1,96, dan nilai-p adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kami dapat mencapai nilai sampel asli sebesar 0,385, yang merupakan indikator yang baik bahwa pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Temuan dari penelitian ini menguatkan temuan dari penelitian lain yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi (Hadis et al., 2022). Selanjutnya, Saputra (2021) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan perhitungan dan mempercepat serta mengurangi kesalahan karena digunakan sistem komputerisasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi pengolahan data, pengolahan informasi, dan proses kerja elektronik yang dimaksudkan untuk melayani masyarakat dengan memudahkan akses terhadap informasi keuangan. Selain itu, jelas bahwa pemrosesan data dengan bantuan komputer meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Dalam islam pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan daerah bukan sekedar kebutuhan teknistetapi juga bagian dari ibadah dalam menegakkan prinsip keadilan, amanah, dan pertanggungjawabandihadapan Allah SWT dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada QS Al-Muthaffifin ayat 1-3, yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya :

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3)." (QS Al-Muthaffifin ayat 1-3)

Dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 menegaskan bahwa larangan segala bentuk kecurangan dalam pengukuran dan pencatatan. Manipulasi data keuangan melalui sistem digital sama kedudukannya dengan *tathfif* (pengurangan timbangan) yang dikecam dalam Al-Qur'an.

Sekretaris desa Bulurejo, Ngudirejo dan Watugaluh menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui aplikasi resmi pemerintah seperti Siskeudes, memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa maupun pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi tersebut, pencatatan transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan sesuai standar yang ditetapkan. Laporan keuangan dapat disusun secara akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memudahkan integrasi dengan laporan pemerintah daerah. Meski masih ada tantangan berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan kendala jaringan internet, secara keseluruhan pemanfaatan teknologi informasi terbukti meningkatkan keteraturan, keandalan, dan kualitas laporan keuangan.

4.6.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi

Analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t-statistik sebesar 2.058 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengujian ini menunjukkan betapa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat mengimbangi dampak sistem pengendalian internal terhadap

keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Karena manajer dan karyawan diatur oleh data saat menyusun laporan keuangan, maka diperlukan sistem pengendalian internal. Menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, maka hasil laporan keuangan akan dapat tersajikan dengan kualitas yang baik. Sistem pengendalian internal berjalan dengan lancar Ketika mengembangkan teknologi informasi. Mengembangkan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal akan membuat kegiatan penyusunan laporan keuangan menjadi cepat dan dapat diperiksa sehingga perbaikan segera dilakukan.

Dalam islam Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi bahkan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, mencakup segala yang turun dan naik. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada QS Al-Hadid ayat 4, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hadid ayat 4)

QS Al-Hadid ayat 4 menegaskan bahwa Allah SWT senantiasa mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa sistem pengendalian internal harus dijalankan dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab agar terhindar dari penyimpangan. Kehadiran teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan data keuangan juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadaan sebenarnya.

Sekretaris desa Bulurejo, Ngudirejo dan Watugaluh mengatakan bahwa

dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal di desa yang sudah berjalan melalui pemisahan tugas, pencatatan yang terdokumentasi, serta pemeriksaan rutin. Pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Siskeudes dapat memperkuat hubungan tersebut yang menjadi sarana penting efektivitas pengendalian internal. Dengan sistem aplikasi yang baku, setiap transaksi dapat dicatat sesuai prosedur dan mudah diawasi. Hal ini membuat laporan keuangan lebih rapi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga teknologi informasi menjadi penghubung penting antara sistem pengendalian internal dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

4.6.7 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Mediasi

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 2.200 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 1.96 dan juga menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.028 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan demikian maka dapat diputuskan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mampu memediasi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang unggul didasarkan pada kombinasi pengalaman kerja yang sesuai, kemampuan alamiah, dan pelatihan. Pegawai pemerintah yang memiliki keahlian dalam pelaporan keuangan memberikan pelaporan yang akurat dan berkualitas tinggi (Leiwakabessy, 2020). Dengan pemanfaatan teknologi informasi, sumber daya manusia akan mampu menyusun catatan keuangan yang andal yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban individu atas aktivitas mereka saat ini.

Dalam islam Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Begitu pentingnya iman dan ilmu sebagai dasar peningkatan kualitas manusia. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada QS Al-Mujadilah ayat 11, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Mujadilah ayat 11)

QS Al-Mujadilah ayat 11 menegaskan bahwa melandaskan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh keimanan dan integritas yang dimiliki.

Sekretaris desa Bulurejo, Ngudirejo dan Watugaluh menjelaskan bahwa perangkat desa yang memiliki kompeten memadai dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Siskeudes dapat memperkuat hubungan tersebut yang menjadi sarana penting dalam mengoptimalkan kompetensi tersebut, dapat memudahkan aparatur desa dalam proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan argumen yang disajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan penerapan pengendalian internal yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta keandalan informasi keuangan.
2. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pelaporan keuangan lebih akurat dan efisien.
4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi di pemerintah daerah sehingga mendorong efektivitas sistem informasi keuangan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik dari aspek ketepatan, keakuratan, maupun akuntabilitas.
6. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimediasi oleh

7. pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga efektivitas pengendalian internal akan semakin optimal ketika didukung oleh penggunaan teknologi informasi.
8. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga peningkatan profesionalisme aparatur dan penguasaan teknologi menjadi faktor strategis dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah desa, disarankan agar pemerintah desa terus memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih andal, transparan, dan akuntabel.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian serta menambahkan variabel lain sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM)*. Andi.
- Adhivinna, V. V., & Damayanti, N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162.
- Agustiawan, Putri, A. M., & Saputra, Y. (2021a). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Audit Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Accounting and Management Journal*, 5.
- Agustiawan, Putri, A. M., & Saputra, Y. (2021b). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Audit Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Accounting and Management Journal*, 5.
- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *JAR: Jambi Accounting Review*, 1(April), 44–62.
- Arfianti, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Arif, M. B., Setyadi, J., & Gafur, A. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi. In *Online) KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* (Vol. 20, Issue 3).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1, No. 1, 58–77.

- Dimas, R., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018b). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 4(1), 33–67. <http://www.inilahkoran.com/69779/kota-bandung-raih-opini-wdp-ini->
- Donaldson, & Davis. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Da. *Pekbis Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Fazlurahman, F., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada BPKA Kota Bandung). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 250–265. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1941.250-265>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goo, E. E. K. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Hadis, F. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 106–120. <https://doi.org/10.30630/jam.v17i2.202>
- Helmi, P. A., & Renil, S. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Menara Ekonomi*, VII(2), 50–62.
- Hullah, A. R., Pangemanan, S., Tangkuman, S., & Budiarmo, N. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 3.

- I Gusti, & Putu Eka. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 137–147.
- Kaukab, M. E., & Lufthiadi, R. (2021). *Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Industri Perhotelan*. 10(1).
- Khoirunnisa, N. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes di Wilayah Kecamatan Karangrejo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.
- Launuru, M. I. (2014). Perspektif Islam Analisa Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Harian Rakyat Maluku. *AMAL: Journal Of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mariana Tampubolon, F., & Basid, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, III(1), 55–65.
- Memon, M. A., Ting, H., Cheach, J.-H., Thurasamy, R., Chuah, F., & Cham, T. H. (2020). Sample Size For Survey Research: Review And Recommendations. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 4(2), 2590–4221.
- Mulyadi. (2016a). *Sistem Akuntansi* (Edisi Empat). Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016b). *Sistem Akuntansi* (Edisi Empat). Salemba Empat.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8228>
- Nengsy, H. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial pada Perbankan di Tembilahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. *Universitas Islam Indonesia*.

- Pangestu, M. E. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Ponorogo. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2).
- Philadelphphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i1.777>
- Puspita, D., Fadli, F., & Halimatusyadiah, H. (2021a). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i2.15247>
- Puspita, D., Fadli, F., & Halimatusyadiah, H. (2021b). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i2.15247>
- Raharjo, K. B. (2013). *Pemahaman SPI (Sistem Pengendalian Internal)*. Wordpress.Com. <https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>
- Rahmany, S., & Fatimah. (2020). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 110–123.
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5244>

- Rizcha, Y. R., & Yaakub, S. (2023). Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Universitas Muhammadiyah Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 8(1), 78–93.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Rusydi, M. K. (n.d.). SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEUANGAN DESA. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Saputra, N. C. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Cash*, 4(02), 82–96. <https://doi.org/10.52624/cash.v4i02.1783>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business* (6th Edition, Ed.). John Wiley & Sons.
- Shofa, A., Wafirotn, K. Z., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Madiun). *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 128–144. <https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.1136>
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Sugiyono. (2019b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Tanjung, A. H., & Wina Sonia. (2021). Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi. *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*, 4(1).
- Winindyaningrum, & Rahmawati. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Wulan, A., Yudi, & Friyani, R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). *JAR: Jambi Accounting Review*, 1(April), 1–19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran 1 Kuesioner Penelitian****A. Sistem Pengendalian Internal**

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	RR	TS	STS
Lingkungan Pengendalian						
1	Kepala desa melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada perangkat desa secara adil.					
2	Kepala desa selalu melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku					
Penilaian Risiko						
3	Kepala desa telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
4	Kepala desa memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
Kegiatan Pengendalian						
5	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan, diotorisasi dan diimplementasikan dengan baik.					
6	Semua transaksi dilampiri dokumen yang lengkap, dientri dan diproses kedalam computer serta diotorisasi					
Informasi dan Komunikasi						
7	Kepala desa telah menyediakan alat pendukung untuk berbagai					

	transaksi dan penyajian laporan keuangan seperti perangkat keras (hardware).					
8	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan dan memungkinkan untuk dilakukan Tindakan korektif secara tepat.					
Pemantauan						
9	Kepala desa melakukan review dan evaluasi tentang kelebihan dan kelemahan					
10	Kepala desa membuat rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal.					

B. Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
Pengetahuan (Knowledge)						
1	Kepala urusan keuangan atau bendahara memahami siklus akuntansi dengan baik					
2	Kepala urusan keuangan atau bendahara diikutkan pelatihan secara rutin sehingga memahami Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang baik.					
Keterampilan						
3	Kepala urusan keuangan atau bendahara telah mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan standar akuntansi.					
4	Kepala urusan keuangan atau bendahara telah mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam menjalankan tugas.					

Sikap (Attitude)						
5	Kepala urusan keuangan atau bendahara selalu mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai.					
6	Kepala urusan keuangan atau bendahara mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan estimasi yang konservatif.					

C. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
Relevan						
1	Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.					
2	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.					
Andal						
3	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah teruji kebenarannya.					
4	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					
Dapat Dibandingkan						
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6	Dalam penyusunan laporan keuangan telah menggunakan					

	kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.					
Dapat Dipahami						
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh pengguna.					
8	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
Perangkat						
1	Pemerintah desa memiliki kapasitas komputer yang memadai untuk melaksanakan tugas.					
2	Pemerintah desa memasang jaringan internet untuk menghubungkan antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
Pengelola Data Keuangan						
3	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
4	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.					
Perawatan						
5	Pemerintah desa telah menerapkan penjadwalan,					

	pemeliharaan, peralatan, pendukung termasuk antivirus sistem informasi secara teratur.					
6	Peralatan pendukung sistem informasi yang rusak/usang didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.					

Lampiran 2 Teks Pertanyaan Wawancara

TEKS PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah kepala desa selalu melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku?
2. Apakah kepala desa telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi?
3. Apakah semua transaksi sudah dilampiri dokumen yang lengkap, dientri, dan diproses ke dalam komputer serta diotorisasi?
4. Apakah kepala desa telah menyediakan alat pendukung untuk berbagai transaksi dan penyajian laporan keuangan seperti perangkat keras (hardware)?
5. Apakah kepala desa selalu melakukan review dan evaluasi tentang kelebihan dan kelemahan?
6. Apakah kepala urusan keuangan atau bendahara memahami siklus akuntansi dengan baik?
7. Apakah kepala urusan keuangan atau bendahara telah mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam menjalankan tugas?
8. Apakah kepala urusan keuangan atau bendahara mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan akuntansi yang konservatif?
9. Apakah laporan keuangan yang disiapkan oleh kepala urusan keuangan atau bendahara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah?
10. Apakah informasi yang disajikan oleh bendahara desa dalam laporan keuangan telah teruji kebenarannya?
11. Apakah informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya?
12. Apakah informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh pengguna?
13. Apakah kepala desa sudah memasang jaringan internet untuk menghubungkan antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan?

14. Apakah pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku?
15. Apakah telah menerapkan penjadwalan, pemeliharaan, peralatan, pendukung termasuk antivirus sistem informasi secara teratur?

Lampiran 3 Data Kuesioner

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL										
No Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
6	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
7	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
10	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5
11	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5
12	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4
13	5	4	5	4	4	4	5	3	5	4
14	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
15	3	3	4	5	3	3	4	4	3	3
16	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
17	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	5	5	5	5	5	4	4	3	5	4
19	5	5	5	5	5	4	3	5	4	5
20	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
21	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
22	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
23	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5
24	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	2	5	4	4	5	5	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	5	4	3	3	4	5	3	4
31	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4

32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4
34	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4
35	4	5	4	3	4	4	5	3	3	4
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3
39	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4
40	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA						
No Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	5	5	5	4	5	5
2	5	5	5	5	4	5
3	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	5
6	5	5	5	5	5	5
7	4	5	4	5	4	4
8	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	3	3	3
10	5	5	4	5	5	5
11	4	4	4	5	4	4
12	4	5	4	4	5	4
13	3	5	5	4	4	5
14	5	4	4	5	5	5
15	3	3	4	4	5	4
16	4	4	4	4	4	5
17	2	3	2	3	2	4
18	4	4	5	5	4	4
19	3	3	4	5	3	3
20	5	5	5	4	5	5
21	4	4	4	4	4	4
22	4	3	3	5	4	4
23	5	5	4	4	5	5
24	4	4	4	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5

28	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4
30	4	5	3	3	4	4
31	3	3	3	3	4	4
32	4	4	4	4	4	4
33	3	5	3	3	3	3
34	4	4	4	4	4	4
35	5	5	4	4	5	5
36	5	5	5	5	5	5
37	3	3	3	3	3	3
38	4	4	5	4	3	4
39	5	4	5	5	5	5
40	4	5	4	4	4	4

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH								
No Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8
1	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	5
6	5	5	5	5	5	5	5	5
7	4	4	4	5	4	5	4	4
8	5	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	3	3	3	3	3
10	5	4	5	5	4	5	5	4
11	4	4	4	4	4	5	5	5
12	5	4	4	5	5	4	4	4
13	3	4	3	5	5	4	4	4
14	5	5	5	4	4	5	5	4
15	3	3	3	3	3	3	3	3
16	4	4	4	4	4	4	4	5
17	2	2	2	3	2	3	2	4
18	3	5	5	5	4	4	3	4
19	4	5	5	4	5	5	5	5
20	5	5	5	5	5	4	5	5
21	5	4	5	4	4	4	4	4
22	4	4	3	3	5	4	4	5
23	4	5	5	4	5	5	3	5

24	5	4	4	4	5	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5	5	5
26	4	5	5	5	4	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5
28	5	4	4	4	4	4	3	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	5	3	4	4	3	4
31	4	3	3	3	4	4	3	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	3	5	3	5	3	4	4
34	4	4	4	4	3	4	4	4
35	5	5	5	4	4	5	4	3
36	5	5	5	5	5	5	5	5
37	3	3	3	3	3	3	3	3
38	4	4	4	5	4	3	3	4
39	4	5	4	5	5	5	4	4
40	5	4	5	4	4	4	3	4

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI						
No Responden	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6
1	5	5	4	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	5	5
7	4	5	5	5	4	4
8	5	5	5	5	5	5
9	3	3	3	3	3	3
10	4	4	4	5	4	4
11	5	4	4	4	5	4
12	5	4	5	5	4	4
13	3	3	4	4	3	5
14	4	5	5	4	5	5
15	3	3	4	5	3	2
16	4	4	4	4	4	4
17	3	4	2	2	2	2
18	5	5	5	5	5	3
19	5	4	5	5	5	5

20	5	5	4	4	5	4
21	4	4	4	4	4	4
22	4	4	3	4	4	4
23	5	5	4	4	5	5
24	4	5	5	5	4	5
25	5	5	5	5	5	5
26	5	4	4	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5
28	4	4	5	4	4	5
29	4	4	4	4	4	4
30	4	3	4	5	4	3
31	4	3	3	5	3	4
32	4	4	4	4	4	4
33	4	5	5	4	3	4
34	4	3	3	4	4	4
35	4	4	4	5	5	4
36	5	5	5	5	5	5
37	3	3	3	3	3	3
38	3	4	4	3	3	4
39	4	5	4	4	5	5
40	3	4	4	4	4	3

Lampiran 4 Hasil Uji SmartPLS

Outer Loadings

	Kualitas Laporan Keuangan Pemerir	Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Internal
X1.1				0.706
X1.10				0.808
X1.2				0.802
X1.3				0.803
X1.4				0.814
X1.5				0.909
X1.6				0.798
X1.7				0.796
X1.8				0.780
X1.9				0.865
X2.1			0.933	
X2.2			0.767	
X2.3			0.860	
X2.4			0.765	
X2.5			0.833	
X2.6			0.866	
Y.1	0.763			
Y.2	0.916			
Y.3	0.815			
Y.4	0.780			
Y.5	0.799			
Y.6	0.861			
Y.7	0.849			
Y.8	0.719			
Z.1				0.887
Z.2				0.784
Z.3				0.823
Z.4				0.737
Z.5				0.896
Z.6				0.798

Construct Reliability and Validity

Construct Reliability and Validity				
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.927	0.931	0.940	0.664
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.915	0.921	0.934	0.705
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.903	0.911	0.926	0.677
Sistem Pengendalian Internal	0.941	0.944	0.950	0.655

Uji R-Square

R Square		
	R Square	R Square Adjusted
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.944	0.940
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.729	0.715

Uji F-Square

f Square				
	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Internal
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.589		0.139	
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.718			
Sistem Pengendalian Internal	0.359			0.316

Cross Loadings

Cross Loadings				
	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Internal
X1.1	0.664	0.622	0.544	0.706
X1.10	0.849	0.731	0.797	0.808
X1.2	0.753	0.651	0.691	0.802
X1.3	0.676	0.627	0.618	0.803
X1.4	0.665	0.590	0.684	0.814
X1.5	0.810	0.723	0.758	0.909
X1.6	0.799	0.706	0.733	0.798
X1.7	0.723	0.824	0.589	0.796
X1.8	0.673	0.554	0.610	0.780
X1.9	0.723	0.726	0.646	0.865
X2.1	0.858	0.933	0.762	0.768
X2.2	0.702	0.767	0.597	0.647
X2.3	0.815	0.860	0.726	0.822
X2.4	0.796	0.765	0.737	0.711
X2.5	0.691	0.833	0.623	0.646
X2.6	0.679	0.866	0.547	0.577
Y.1	0.763	0.684	0.708	0.698
Y.2	0.916	0.881	0.854	0.824
Y.3	0.815	0.707	0.757	0.778
Y.4	0.780	0.853	0.675	0.751
Y.5	0.799	0.655	0.767	0.760
Y.6	0.861	0.814	0.802	0.710
Y.7	0.849	0.726	0.753	0.770
Y.8	0.719	0.571	0.626	0.643
Z.1	0.798	0.663	0.887	0.680
Z.2	0.690	0.624	0.784	0.618
Z.3	0.685	0.578	0.823	0.703
Z.4	0.639	0.581	0.737	0.576
Z.5	0.875	0.806	0.896	0.751
Z.6	0.794	0.677	0.798	0.755

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

6/24/24, 4:30 PM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Mencrangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ardini Khairul Ummami
NIM : 19520015
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI ADA KECAMATAN DIWEK JOMBANG)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
17%	15%	8%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juni 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 6 Jurnal Bimbingan

6/24/24, 4:33 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520015
Nama : Ardini Khairul Ummami
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Dr. Meldona, MM
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA KECAMATAN DIWEK JOMBANG)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	4 November 2022	Pengajuan judul proposal skripsi kepada dosen pembimbing	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	17 November 2022	Konsultasi terkait objek penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	15 Maret 2023	Konsultasi Proposal Penelitian Bab 1, 2, 3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	19 Maret 2023	Revisi Proposal Penelitian Bab 1, 2, 3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	23 Maret 2023	Konsultasi Revisi Proposal Penelitian Bab 1, 2, 3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	18 Mei 2023	Revisi Proposal Penelitian Bab 1,2,3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	21 Mei 2023	Acc Proposal Penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	21 Mei 2023	Acc Proposal Penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	18 Maret 2024	Revisi Proposal Hasil Seminar	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

6/24/24, 4:33 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

10	16 April 2024	Acc Proposal Hasil Seminar	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
11	3 Juni 2024	Konsultasi Bab 4 & 5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
12	21 Juni 2024	Revisi & Acc Bab 4 & 5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 21 Juni 2024

Dosen Pembimbing

**Dr. Meldona, MM**

Lampiran 7 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Ardini Khairul Ummami
 Tempat, tanggal lahir : Jombang, 17 Juli 2000
 Alamat Asal : Tebuireng Gang II Rt 02 Rw 08 Diwek, Jombang,
 Jawa Timur
 Alamat Kos : Perumahan Gajayana Inside No B4 Malang
 Telepon/Hp : 08970907549
 E-mail : ardinikhairulumm@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2007 : TK PG Tjoekir
 2007-2009 : MI Perguruan Mu'alimat Cukir
 2009-2013 : MI Mujahidin Parimono
 2013-2016 : SMP Negeri 1 Diwek
 2016-2019 : MA Negeri 4 Jombang
 2019-2024 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al'Aly Malang
 2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 2020-2021 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris
 (PKPBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2020	: Anggota Islamic Department Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi
2020-2021	: Anggota BSO PSDA Kopri Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”
2021	: Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi
2021-2022	: CO BSO Media dan Jaringan Kopri Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”
2022	: Ketua Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta *Accounting Gathering* Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma’Had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan CV Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022
- Peserta Pelatihan ACCURATE Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022
- Peserta Pelatihan ATLAS Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022

Malang, 22 Juni 2024

Ardini Khairul Ummami